

**PERAN HUMAS POLRES MUNA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM
COMMUNITY POLICING UNTUK MENINGKATKAN KEMITRAAN
DENGAN MASYARAKAT**



SKRIPSI

Oleh :

Rory Tri Kusuma Dewi

06331018

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2011

SKRIPSI

PERAN HUMAS POLRES MUNA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM *COMMUNITY POLICING* UNTUK MENINGKATKAN KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT

Disusun oleh

RORY TRI KUSUMA DEWI

06331018



Telah disetujui
Tanggal : 23 Desember 2011

Dosen Pembimbing Skripsi,

Anang Hermawan, S. Sos., MA

NIDN : 0506067702

PENGESAHAN UJIAN

PERAN HUMAS POLRES MUNA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM *COMMUNITY POLICING* UNTUK MENINGKATKAN KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan untuk memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Nama : RORY TRI KUSUMA DEWI

No Mahasiswa : 06331018

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Yogyakarta, 23 Desember 2011

Disahkan oleh,

Tim Penguji

Penguji I/Pembimbing

Penguji II

Anang Hermawan, S. Sos., MA
NIDN : 0506067702

Drs. Ahmad Muntaha Msi
NIDN 0527056401

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Anang Hermawan, S. Sos., MA
NIDN : 0506067702

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Rory Tri Kusuma Dewi

No. Mahasiswa : 06331018

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : **PERAN HUMAS POLRES MUNA DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM *COMMUNITY
POLICING* UNTUK MENINGKATKAN
KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT**

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosila Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Desember 2011

Yang menyatakan

RORY TRI KUSUMA DEWI

06331018

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu sendiri. Orang yang jahat tidak akan mencelakakanmu jika kamu betul-betul memegang petunjuk Allah.”

(Qs. Al-Maidah : 105)

“ Disini pencarianku berakhir

Dititik dimana aku menemukan kebenaran tak terbantahkan

Masih banyak memang pertanyaan yang belum terpecahkan

Tetapi entah kekuatan apa yang membuat aku tetap bertahan

Disini pencarianku berakhir

Dititik ketika kegelisahanku menemukan penawarnya

Masih banyak memang yang bisa aku lakukan

Namun setidaknya jalan lurus telah aku tempuh meski hanya dalam diam ”

(Gusbud)

Hati yang bersih akan peka terhadap ilmu, apapun yang dilihat, didengar, dirasakan jadi samudera ilmu yang membuatnya kian bijak, arif dan tepat dalam menyikapi hidup ini

(Abdullah Gymnastiar)

PERSEMBAHAN

*Karena Allah tidak pernah menutup mata
Karena Allah memberikan segala kemudahanNya dan selalu menemaniku dalam menyusun
karya ini.*

*Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku
Ayahanda Suwito dan Ibunda Salfia, Kakakku tersayang Putri dan Haryo yang tidak
pernah lelah mendoakan, menopang ketika terjatuh dan selalu ada disaat sedih, letih, dan
bahagiaku.*



Kata Pengantar

Bismillahirrahmaanirrahiim....

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT pengatur semesta alam, yang melimpahkan segala rahmat hidayah dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Humas Polres Muna Dalam Implementasi Program *Community Policing* Untuk Meningkatkan Kemitraan Dengan Masyarakat”**. Secara umum, skripsi ini membahas tentang program Humas Polres Muna Sulawesi Tenggara dalam rangka peningkatan kemitraan dengan masyarakat. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

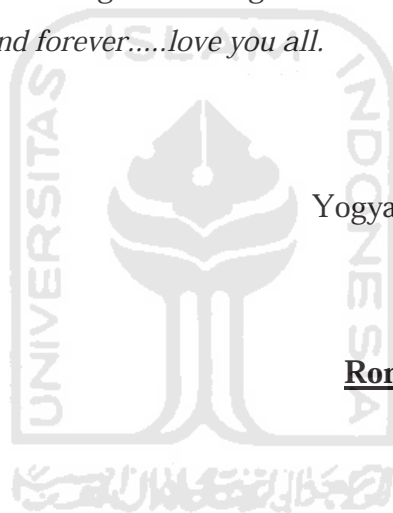
Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik bantuan moril maupun materiil. Penulis tidak bisa membalas bantuan tersebut satu persatu, hanya ALLAH SWT yang dapat membalasnya dengan berlipat ganda. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Anang Hermawan, S. Sos., MA selaku dosen pembimbing dan ketua Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Sus Budiharto, S.Psi., Psikolog, selaku dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak dan Ibu Dosen, beserta Staf Akademik, Staf Tata Usaha, dan Staf Lingkungan fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya.
4. Kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan, memberikan suport, dan sabar menuntun hingga studi ini terselesaikan.
5. Kepada kakakku tersayang Putri dan Haryo yang menjadi motivasiku untuk selalu berjuang dan berdoa dalam menyelesaikan studi ini.

6. *My Dear* "M. Rizki Budhiman" (*bebeb*) yang setia menemani langkahku baik disaat susah maupun bahagia. Terimakasih atas segala ketulusan cinta dan kasih sayangmu.
7. Kepada sahabat sehatiku Apryanti (Keanu), genk 05 Smundara, meski lewat pesan singkat suport kalian mampu menyemangatiku, teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2006, genk Bu'ul, mba Aya, Pungky, anak-anak kos Condong Asri Dynar, Ika, Pino, Tya, Enik, dan semua sahabat yang tidak bisa ku sebutkan semua, sungguh, kalian adalah sosok yang selalu mampu membangunkan kembali semangatku ketika terjatuh dan selalu menghibur ketika bersedih. Dengan semua hal telah yang kita lalui bersama membuatku mengerti tentang arti seorang sahabat sejati dalam hidup ini. *Best friend forever.....love you all.*

Yogyakarta, 23 Desember 2011

Rory Tri Kusuma Dewi



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN UJIAN.....	ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN, GAMBAR, TABEL	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Prinsip-prinsip Hubungan Masyarakat Dalam Organisasi	13
2. Program Kehumasan dalam Perspektif Manajemen Strategik	19
F. Metode Penelitian	25
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	29
A. Sejarah <i>Community Policing</i> di Indonesia	32
B. Profil Polres Muna Sulawesi Tenggara	36
C. Falsafah Perpolisian Masyarakat (Polmas)	40
1. Tujuan <i>Community Policing</i>	41
D. Profil Narasumber	43
BAB III TEMUAN DAN ANALISIS	45
A. Kebijakan Polres Muna dalam Program <i>Community Policing</i>	46
B. Strategi Komunikasi Program <i>Community Policing</i> (Pendekatan Manajemen Strategi)	54
1. <i>Planning</i> (Perencanaan)	58
2. <i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	67
3. <i>Actuating</i> (Pelaksanaan)	72
4. <i>Controlling</i> (Evaluasi)	85
C. Analisis SWOT	90
1. <i>Strength</i> (Kekuatan)	90
2. <i>Weakness</i> (Kelemahan)	91

3. <i>Opportunity</i> (Peluang dan Kesempatan)	92
4. <i>Threat</i> (Ancaman)	95
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Kendala	98
C. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100



DAFTAR BAGAN, TABEL, DAN GAMBAR

Bagan 1	: Struktur Organisasi Humas Polres Muna	42
Bagan 2	: Struktur Organisasi Binamitra Polres Muna	43
Tabel 1	: Jumlah Kecamatan Di Kabupaten Muna	31
Tabel 2	: Informan Peserta Program <i>Community Policing</i>	44
Tabel 3	: Penjabaran Tugas Bagian Binamitra Polres Muna	67
Tabel 4	: Data Kegiatan Binamitra Polres Muna	78
Gambar 1	: Peta Administrasi kabupaten Muna	30
Gambar 2	: Proses Pembinaan dan Penyuluhan Binamitra Polres Muna.....	74



ABSTRAKSI

Rory Tri Kusuma Dewi, 06331018. Peran Humas Polres Muna dalam Implementasi Program *Community Policing* Untuk Meningkatkan Kemitraan dengan Masyarakat. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2011.

Keahlian menjalankan fungsi Humas secara profesional dari aparat Kepolisian merupakan instrumen strategis untuk membangun komunikasi yang sejajar dengan masyarakat. Satu wujud profesionalisme Polri ketika menjalankan fungsi Humas adalah tanggapan terhadap setiap reaksi masyarakat terhadap apapun yang dilakukan anggotanya. Sebagai suatu strategi *Community Policing* atau Polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan serta meningkatkan kualitas warga setempat. Perbandingan antara jumlah Polisi dan masyarakat di Indonesia jauh berbeda, dengan standar ratio 1; 400, maka Polri membentuk program *Community Policing* agar masyarakat dan Polri dapat bekerja sama dalam memelihara Kamtibmas. Humas Polres Muna adalah salah satu lembaga Kepolisian yang menjalankan dan menekankan program ini untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penelitian ini membahas tentang strategi Humas yang dilakukan dalam program *Community Policing* sebagai peningkatan kemitraan bersama masyarakat. Terdapat beberapa permasalahan yang harus dijawab yang pertama, Bagaimana program Humas *Community Policing* Polres Muna sebagai penunjang strategi dalam rangka meningkatkan kemitraan dengan masyarakat agar tercipta kondisi lingkungan yang aman dan tertib, dan kedua, bagaimana peluang dan hambatan yang dihadapi Polres Muna dalam implementasi strategi *Community Policing*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan paradigma konstruktivisme dan deskriptif kualitatif dengan narasumber dari anggota kepolisian Polres Muna bagian Humas dan Binamitra serta beberapa masyarakat setempat.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, Pertama, program *Community Policing* di Kabupaten Muna Sulawesi dilakukan dengan melakukan komunikasi persuasif dan komunikasi langsung. Menggunakan pendekatan manajemen strategi : perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelaksanaan lebih banyak dilakukan dengan cara penyuluhan di berbagai daerah-daerah yang terdapat di Kabupaten Muna tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, dengan menggunakan analisis SWOT : peluang, masyarakat memberikan respon positif dan ikut bekerjasama terhadap program ini sedangkan hambatan, SDM yang minim dan kurangnya dana dan sarana yang memadai untuk memberikan pelayanan di daerah-daerah pelosok.

Kata Kunci : *Community Policing*, Peran Humas, Meningkatkan Kemitraan Masyarakat, Polres Muna.

ABSTRACT

Rory Tri Kusuma Dewi, 06331018. "Police Public Relations Muna role in the Implementation Community Policing Program to Increase Partnership with the Society. Bachelor Thesis". Bachelor Thesis. Communication Department, Faculty of Psychology and Social-Cultural Science, Islamic University of Indonesia. 2011.

The expertise in a professional public relations function of police officers is a strategic instrument to build a parallel communication with the community. One form of police professionalism when executing the function of PR is a response to any public reaction to anything that has been done by its members. As a community policing or Polmas, it means a model that emphasizes equal partnerships with local communities to solve and resolve any social problems that threaten security and public order and tranquility of people's life with the aim to reduce crime and improve the quality of local residents. Comparison between the number of police and community in Indonesia is much different, with the standard ratio of 1: 400, then the Police Community programs policing form so that the community and police can work together in maintaining Kamtibmas. Police Public Relations in Muna is one of institution that runs the Police Department and stressed the program to establish partnerships with civil society to create conditions for a safe and orderly environment.

Based on that framework, this research talks about public relation strategy that is conducted in a Policing Community as a increasing of partnership together with the society. There are several problems that must be answered. First, how Policing Police Community Relations Muna's Program as supporting strategies to enhance partnerships with the community to create conditions for a safe and orderly. Second, how can the opportunities and obstacles faced in implementation of Muna Police Community strategy Policing. The purposes of this study are to describe and explain the opportunities and constraints of the program at the Police Community Policing Muna, Southeast Sulawesi. This research uses constructivism paradigm approach and qualitative descriptive with informants from Polres Muna member of human division and Binamitra with some people from around the research field.

The study produced several findings, first, Policing Community program in Muna has done through persuasive communication and direct communication. It used a strategic management approach: planning, organization, implementation, and evaluation. The implementation is mostly done by counseling in various areas located in Muna on the importance of community participation in maintaining security and order. Second, by using a SWOT analysis: the opportunity, people give a positive response and follow this program while working against the barriers, a lack of human resources and lack of adequate funds and facilities to provide services in remote areas.

Keywords: Community Policing, Police Public Relations Strategy, Improving Community Partnership, Polres Muna.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan masyarakat (Humas) merupakan suatu fungsi manajemen untuk membangun dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai pihak yang berpengaruh (*stakeholder*), ini menunjukkan bahwa hubungan masyarakat bukan alat manajemen yang dapat diadakan, melainkan fungsi yang melekat menjadi satu dengan manajemen (Effendy, 2003:135). Saat ini sebagian besar Humas pada lembaga Polri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih banyak terkendala, dari masalah struktur dan organisasi humas, kultur/budaya kerja praktisi atau pejabat Humas yang masih kurang strategis, dan belum ditunjang sarana kerja yang memadai.

Sebagaimana kita maklumi bahwa dalam rangka pemecahan Keamanan dan Ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) terutama pada level lokal, dewasa ini badan kepolisian bersama pemerintah diberbagai negara mengembangkan program *Community Policing* sebagai suatu model perpolisian yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Model tersebut saat ini kita adopsikan tetapi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dengan cara dan nama Indonesia yang disebut dengan Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut Polmas.

Sebagai suatu srategi Polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan serta meningkatkan kualitas warga setempat.

Keterlibatan seluruh komponen dan bangsa dalam menanggulangi kejahatan dan memecahkan permasalahan sosial melalui kedekatan dan kerjasama antara Polri dengan masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif. Untuk itu penerapan Polmas dengan memerdayakan warga masyarakat sangat diperlukan sehingga masyarakat tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian melainkan sebagai subjek yang menentukan dalam pengelolaan sendiri upaya-upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketentraman dan keselamatan kehidupan bersama, yang di fasilitasi oleh pers Polri yang berperan dalam tugas Polmas dalam rangka kemitraan.

Polmas mengandung makna sebagai suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial atau kemanusiaan dan menampilkan sikap santun serta saling menghargai antara polisi dan warga masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemolisian masyarakat atau biasa disebut Polmas merupakan *Grand Strategy* Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegak hukum, pelindung, penganyom serta pelayanan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi bimbingan masyarakat (Binmas) yang sesuai dengan kondisi di Indonesia baik di masa lalu maupun di Era Reformasi (demokrasi dan perlindungan HAM). Untuk memberikan pemahaman bagi seluruh jajaran Polri agar Polmas dapat terlaksana dengan efektif, maka perlu adanya pedoman dasar strategi dan implementasi Polmas yang komprehensif untuk dijadikan pedoman yang jelas bagi para pelaksana Polmas yang komprehensif untuk dijadikan pedoman yang jelas bagi para pelaksana Polmas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pejabat Kepolisian adalah pejabat dilingkungan Polri dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan kepolisian.

Community Policing diterjemahkan Pemolisian masyarakat atau Perpolisian masyarakat yang disingkat Polmas. *Policing* dapat diartikan sebagai Perpolisian yaitu segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filosofis yang melatarbelakanginya. Pemolisian yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi Kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. *Community* yang diterjemahkan komunitas dapat diartikan sebagai sekelompok warga laki-laki dan perempuan atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*).

Batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja, kawasan industri, pusat/komplek olahraga, stasiun bus/kereta api, dan lain-lainnya. Warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok atau merasa menjadi bagian dari suatu kelompok berdasar kepentingan (*community interest*), contohnya kelompok berdasarkan etnis/suku, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, hobi, dan lain-lainnya. Polmas diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal dalam suatu lokasi tertentu ataupun lingkungan komunitas berkesamaan profesi (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan, dan sebagainya), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunikasi antar warga satu sama lain berlangsung secara intensif atau

adanya kesamaan kepentingan. Contohnya, kelompok ojek, hobi burung perkutut, pembalap motor, hobi komputer dan sebagainya yang semuanya bisa menjadi sarana penyelenggaraan Polmas.

Masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti lebih luas, misalnya kecamatan, kota, kabupaten, atau propinsi, atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern dan sebagainya.

Polmas (Pemolisian/Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Setiap perusahaan atau instansi pasti berharap untuk memiliki citra yang positif dimata publik, karena citra positif itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepercayaan publik. Citra tersebut dapat terlihat dari pendapat atau pola pikir pada saat mempersepsikan realitas yang terjadi. Realitas didapatkan dari media massa atau media-media lain yang berhubungan langsung dengan publik dan bisa dianggap mewakili persepsi yang lebih besar yakni seluruh masyarakat. Dengan begitu, satu hal yang perlu dipahami sehubungan dengan terbentuknya sebuah citra perusahaan adalah adanya persepsi yang berkembang dalam benak publik terhadap realitas yang ada.

Pada dasarnya Humas merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan setiap organisasi yang bersifat komersial maupun non komersial. Kebutuhan akan kehadirannya tidak dapat dicegah, terlepas dari kita menyukainya atau tidak. Humas merupakan salah satu elemen yang

menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif. Kegiatan kehumasan di sebuah instansi menjadi sebuah keharusan untuk membangun citra instansi tersebut. Kehumasan dipahami menjadi suatu senjata ampuh untuk mempengaruhi opini publik kepada instansi, tetapi kendala terbesar dalam perkembangan kehumasan di Indonesia adalah kesalahpahaman para pembuat keputusan di perusahaan dalam menanggapi kegiatan kehumasan (Anggoro, 2002 : 57).

Citra Polisi di mata masyarakat mengalami pasang surut. Pencitraan positif yang dibangun sebagai komitmen menuju profesionalisme Polisi, ternyata sering disalahgunakan oleh ulah oknumnya sendiri sehingga polisi sering divonis oleh masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan. Walaupun begitu, Polri sebagai lembaga negara tetap berusaha melaksanakan paradigma sebagai lembaga yang melindungi, mengayomi, mengabdikan dan melayani masyarakat. Banyak upaya yang dilakukan lembaga penegak hukum tersebut seperti meningkatkan profesionalitas dengan pendidikan juga memperbaiki dari segi undang-undang agar kepolisian bisa lebih baik dalam melakukan tugasnya. Namun upaya Polri untuk mendekatkan kepolisian dengan masyarakat akan kurang efektif jika tidak mengkomunikasikan upaya-upaya tersebut kepada masyarakat secara baik. Untuk itu berbagai media komunikasi dibutuhkan agar bisa menjembatani hubungan Kepolisian dengan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah acara *talkshow* dimana Kepolisian sebagai narasumber dapat menjelaskan posisi dan upaya mereka dalam mengayomi dan melindungi masyarakat.

Agar citra negatif aparat Kepolisian tidak semakin menguat di benak masyarakat, maka institusi berupaya keras untuk meningkatkan citra positif Kepolisian diantaranya adalah :

1. Pembinaan SDM Polri dan Sistem Pendidikan Polri.

Salah satu upaya yang penting dilakukan dalam hal ini adalah dengan melalui penyiapan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan secara konseptual maupun teorikal, yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dalam melaksanakan tugas Kepolisian.

Pengelolaan Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kinerja, produktifitas dan pencapaian tujuan organisasi, karena sumber daya manusia merupakan modal besar dalam menentukan organisasi Polri dalam melayani masyarakat yang memiliki banyaktuntutan.

Menyikapi banyak tuntutan dari masyarakat, Polri harus mengambil langkah pembenahan ke dalam tubuh Polri, termasuk pembenahan sistem pendidikan Polri. Di sisi lain secara kualitas, Polri juga harus berupaya untuk memenuhi rasio jumlah Polisi terhadap jumlah penduduk Indonesia, sehingga dapat mencapai standar yang telah ditentukan yaitu standar PBB adalah 1 : 400 (<http://www.komisikepolisianindonesia.com>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2011).

2. Menanamkan Budaya Melayani (*Service Culture*).

Birokrasi Polri juga perlu di evaluasi kembali. Proses-proses birokrasi pada sentra layanan masyarakat, pembuatan surat izin mengemudi, STNK, dan BPKB, kelakuan baik/catatan kepolisian dan lainnya merupakan hal-hal yang dekat dengan masyarakat, sehingga langsung mendapat pandangan atau reaksi masyarakat bila terdapat penyelewengan. Secara eksternal Polri, perlu mengembangkan sejumlah program-program yang dapat menjalin kemitraan yang lebih nyata dengan masyarakat. Forum komunikasi yang digunakan selama ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat ingin sekali dapat berkomunikasi dengan Polri secara langsung dengan posisi sejajar dan seimbang.

Adapun bentuk lain yang dapat dikembangkan diantaranya adalah bagaimana eksistensi Polri menjadi lebih dekat, demokratis dan mendapat dukungan serta simpati dari masyarakat. Program tersebut seperti kemitraan dengan sejumlah sekolah untuk program-program pembinaan hukum dan Kepolisian, polisi tanpa seragam, forum diskusi dan masyarakat, integrasi Kepolisian pada RT maupun RW, dan lainnya.

3. Program Akselerasi dan Komitmen Terhadap Organisasi (*Organization Commitment*).

Tanpa komitmen, terutama komitmen pimpinan, maka semua yang diinginkan sebelumnya menjadi tidak bermakna. Dengan demikian, komitmen diharuskan sebagai bagian dari salah satu program dalam upaya meningkatkan citra positif Kepolisian. Contohnya adalah komitmen Polri yang terkait dengan upaya pelayanan prima yang akan menjadi program yang semakin ditingkatkan pelaksanaannya, maka Polri harus menjadi institusi yang memberikan pelayanan terbaik (*Public Service Policing*).

Kantor-kantor pelayanan Kepolisian harus dijadikan tempat yang nyaman dan menyenangkan, bukan tempat yang menakutkan. Polri harus meningkatkan upaya untuk membersihkan berbagai penyimpangan dan perilaku yang menyakitkan hati rakyat, antar lain dengan menghilangkan berbagai bentuk perilaku menyimpang yang terjadi dalam pelaksanaan tugas, dan menggantikannya dengan perilaku yang menampilkan kinerja yang bagus dan berkualitas, baik dengan tidak melakukan tindakan yang membebani dan mempersulit masyarakat, dan menggantikannya dengan pelayanan yang cepat, mudah dan nyaman bagi masyarakat (www.komisikepolisian.com diakses pada tanggal 10 Agustus 2011).

Selama ini institusi Polri yang senantiasa memberikan pelayanan publik belum memiliki naluri kehumasan, dan bahkan tidak serius dalam menempatkan lembaga kehumasan dalam struktur kerja lembaga tersebut dalam struktur kerja lembaga itu dari pusat hingga ke Polsek di tingkat kecamatan. Perlu ditinjau kembali upaya membangun profesionalisme Humas Kepolisian guna mengembalikan *image* dan reputasi Polri melalui kemampuan komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang tepat akan menentukan efektifitas dari upaya pembentukan *image* yang positif.

Sejak Polri sebagai aparat penegak hukum dan pelayanan publik dipisahkan dari lingkungan TNI, sebenarnya terdapat harapan baru akan peran

dan kiprah besar lembaga ini di tengah masyarakat. Sebagai institusi pelayanan publik, Polri senantiasa bersentuhan dengan dinamika masyarakat. Di era transisi demokrasi seperti saat ini, dinamika masyarakat sedang dipenuhi dengan *euforia* kebebasan, sekaligus semangat bangkitnya *civil society* hampir di seluruh elemen kehidupan sosial.

Polri yang semakin berat tugasnya di tengah arus sosial dan semakin maraknya konflik-konflik di tengah masyarakat, tidak perlu kehilangan kepercayaan diri dalam menjalankan tugasnya. Variasi masyarakat dalam mengekspresikan kebebasan dan mencari jati diri dalam mewujudkan masyarakat demokratis, hendaknya disikapi secara dewasa. Keberanian institusi Polri untuk mengedepankan pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan kemanusiaan, kesejahteraan, adalah gagasan yang jelas yang tentu memiliki konsekuensi panjang dan beragam bagi seluruh jajarannya dari pusat hingga daerah. Paradigma sebelumnya yang terlalu militeristik dengan mengandalkan keamanan sebagai segala-galanya, sudah saatnya ditinjau kembali.

Pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan akan lebih mudah terealisasi ketika Polri memiliki naluri komunikasi yang lebih kondusif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Tujuan dari *Public Relations* (humas) adalah untuk membentuk opini publik yang menguntungkan bagi institusi dan sekaligus membangun *image* positif bagi keberadaan seluruh institusi (Soenarko S, 2003 : 14). Maka, dengan *image* dan opini publik tertentu yang terbentuk di benak masyarakat, akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dan penerimaan anggota masyarakat terhadap aparat Kepolisian.

Hal ini terkait dengan kinerja referensi dan pengalaman yang dimiliki anggota masyarakat tentang seluk beluk lembaga Kepolisian, sehingga akan berpengaruh pada sikap dan tanggapan masyarakat ketika berkomunikasi dengan aparat Kepolisian. Disinilah keberadaan Humas sangat penting dan strategis dalam rangka menopang kerja Polisi saat berinteraksi dengan masyarakat.

Keahlian menjalankan fungsi Humas secara profesional dari aparat Kepolisian merupakan instrumen strategis untuk membangun komunikasi yang sejajar dengan masyarakat. Hal ini akan memudahkan terwujudnya kesamaan pengertian di antara mereka dan selanjutnya melahirkan kepercayaan dan terbangunnya reputasi yang handal di tengah-tengah masyarakat. Satu wujud profesionalisme Polri ketika menjalankan fungsi Humas adalah tanggapan terhadap setiap reaksi masyarakat terhadap apapun yang dilakukan anggotanya.

Dilihat dari perjalanan sejarah keberadaan Polisi di Kabupaten Muna senantiasa diwarnai dengan pengaruh pemerintah penjajah, kerajaan sampai kepada pemerintah di dalam kemerdekaan, sehingga mengalami perubahan – perubahan sesuai dengan jamannya. Didalam kenyataannya polisi di Kabupaten muna pada zaman tersebut telah ada dengan nama Polisi Landshap di bawah koordinasi langsung pemerintah Swapraja dan polisi Basteur dibawah koordinasi pemerintah belanda (Dokumen Unit Humas Polres Muna Sulawesi Tenggara).

Sebagaimana telah diungkapkan diatas bahwa polres Muna telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan kemajuan zaman dan kondisi masyarakat setempat serta melakukan pembenahan-pembenahan kedalam, baik yang diturunkan melalui pemerintah dari pimpinan atas maupun interen Polres Muna.

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi dalam organisasi akan membuat organisasi itu macet dan berantakan. Menurut Kohler (1981) komunikasi yang efektif sangat penting bagi semua organisasi. Oleh karena itu, para pimpinan organisasi dan para komunikator dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka (Muhammad, 2002:1).

Oleh karena itu institusi Polri diharapkan segera melakukan sarana kerja dan peningkatan pengetahuan serta wawasan petugas/pejabat Humas,

guna menyikapi tantangan berat itu. Untuk bisa membangun citra positif Polri, Humas bekerja secara profesional dan konsisten, selain harus ada upaya perbaikan kinerja Polri yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Kurangnya komunikasi antar instansi dengan masyarakat terkadang dapat menimbulkan adanya beberapa informasi yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan citra instansi tersebut menjadi negatif. Hal tersebut juga sering dialami oleh Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.

Masalah ini dipilih untuk mengetahui bagaimana Humas Polres Muna Sulawesi Tenggara dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama yang efektif dengan masyarakat agar terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan tertib. Polri tidak dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna tanpa turun tangan dari masyarakat, karena jumlah Polri tidak sebanding dengan jumlah masyarakat. Maka Polri harus dapat membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat dengan pendekatan dan komunikasi yang baik. Kesalahan dalam penyampaian dan penangkapan informasi juga mempengaruhi terbentuknya *image* positif dimata masyarakat. Untuk itu Humas yang lebih banyak berhubungan dengan masyarakat luaslah yang sangat berperan dalam upaya pembentukan *image* positif Kepolisian, walaupun realitas dan kondisi di lapangan juga sangat menentukan hasil yang hendak dicapai dalam meningkatkan *image* yang positif.

Bersinggungan dengan soal *image* dan reputasi Polri, sudah saatnya lembaga ini lebih serius memperhatikan keberadaan Humas sebagai penopang dalam menjalankan tugas keseharian. Kondisi demografis sebagian besar anggota masyarakat yang masih di bawah rata-rata kualiatatif, misalnya tingkat pendidikan yang masih kurang atau budaya dengar yang begitu

dominan, serta pengetahuan dan wawasan yang begitu sempit, membutuhkan respon dan kepedulian tersendiri dari aparat Kepolisian.

Disinilah keberadaan Humas sangat penting dan strategis dalam rangka menopang kerja Polisi saat berinteraksi dengan masyarakat. Keahlian menjalankan fungsi Humas secara profesional dari aparat Kepolisian merupakan instrumen strategis untuk membangun komunikasi yang linier dan sejajar dengan masyarakat, sehingga memudahkan terwujudnya kesamaan pengertian di antara mereka dan selanjutnya melahirkan kepercayaan dan terbangunnya reputasi yang andal di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana program Humas *Community Policing* Polres Muna sebagai penunjang strategi dalam rangka meningkatkan kemitraan dengan masyarakat agar tercipta kondisi lingkungan yang aman dan tertib ?
2. Bagaimana peluang dan hambatan yang dihadapi Polres Muna dalam implentasi strategi *Community Policing* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan program Humas *Community Policing* Polres Muna Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan kemitraan dengan masyarakat agar tercipta kondisi lingkungan yang aman dan tertib.
2. Untuk menjelaskan peluang dan hambatan dari pelaksanaan program Humas *Community Policing* Polres Muna Sulawesi Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis.

Sebagai bahan pengetahuan tentang ilmu komunikasi khususnya strategi *Public Relations* atau Kehumasan yang dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan strategi sebuah institusi pemerintahan yaitu Polres Muna Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan citra positif di benak masyarakat.

2. Manfaat Praktis.

Sebagai bahan kajian bahwa strategi *Public Relations* atau Kehumasan merupakan suatu bentuk komunikasi yang bertujuan menyebarkan informasi sehingga mampu membangun hubungan dan komunikasi yang efektif antara Polisi dan masyarakat agar tercipta kondisi lingkungan yang aman dan tertib.

3. Bagi Institusi yang diteliti.

Memberikan masukan berupa saran, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai institusi pemerintahan, sehingga dapat memaksimalkan mutu dan kualitas pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun yang non komersial. Kebutuhan akan kehadirannya tidak bisa dicegah, terlepas dari kita menyukainya atau tidak, karena Humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif. Arti penting Humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada era globalisasi dan “banjir informasi” seperti saat ini (Anggoro, 2002 : 1).

Ruang lingkup sebuah Humas dalam sebuah organisasi atau lembaga antara lain membina hubungan ke dalam (*public internal*), dimana publik merupakan bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang Humas harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal

yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. Membina hubungan ke luar (*public eksternal*) merupakan publik umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran terhadap yang di wakilinya (Ruslan, 1998 : 22).

Adapun teori yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip Hubungan Masyarakat dalam Organisasi

Hubungan masyarakat merupakan suatu profesi yang menghubungkan antara lembaga atau organisasi dengan publiknya yang ikut menentukan kelangsungan hidup lembaga tersebut. Karena itu Humas berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen, memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Humas pada dasarnya menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan baik dengan publik. Dalam *Public Relations* dibedakan duamacam publik yang menjadi sasaran yakni publik internal dan eksternal.

Menurut Dozier (1992) peranan praktisi Humas dalam organisasi merupakan salah satu kunci penting dalam pemahaman akan fungsi *Public Relations* dan komunikasi organisasi disamping sebagai sarana pengembangan pencapaian profesionalitas dari praktisi Humas.

Secara sederhana tugas praktisi Kehumasan adalah menjadi penghubung antara lembaga publik dengan masyarakat luar agar tercapai saling pengertian, kerjasama dan sinergi yang positif antara berbagai pihak yang ada. Dalam konteks lembaga-lembaga publik seperti pemerintah, sejatinya peran melayani dan mengembangkan dukungan publik guna mencapai tujuan organisasi, mejadi suatu yang sangat penting dimainkan oleh praktisi Kehumasan.

Pada konteks ini, maka praktisi Humas harus bisa membentuk nilai-nilai, pemahaman, sikap-sikap, sampai perilaku dari publik agar sejalan dengan kebutuhan organisasi. Melalui pengemasan pesan-pesan komunikasi publik yang lebih banyak berisikan tentang apa dan siapa serta manfaat apa yang didapatkan dari keberadaan organisasi tersebut. Pesan-

pesan ini dapat dikomunikasikan melalui media massa atau media lain yang dipilih sesuai dengan target sasaran.

Dapat dikatakan bahwa *Public Relations* terlihat dan bersifat integratif dalam manajemen organisasi tempat ia bekerja. Hal itu merupakan satu bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi tersebut. PR harus memberi identitas organisasinya dengan tepat dan benar serta mampu mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat kepada institusi Polri, hal itu membawa dampak yang sangat signifikan bagi institusi Polri untuk segera berbenah diri. Suatu institusi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kontrol internal dan eksternal, dan Humas merupakan suatu bagian yang sangat berperan di dalamnya.

Peran Humas sangat erat hubungannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Humas lebih menekankan untuk menggalang pengertian antar lembaga yang diwakilinya dengan publik yang menjadi target sasarannya (*target audience*), disamping itu tidak terkepas dari pengabdianya demi kepentingan umum.

Dalam perannya bagi organisasi, Humas memiliki tiga fungsi (Canfield, 1993 : 137-140), yaitu :

1. Mengabdikan kepada kepentingan umum (*it should serve the public interest*). Dalam hal ini berkaitan dengan tugas Humas untuk membina hubungan yang harmonis antara manajer beserta stafnya dengan para karyawan. Tugas keluarnya adalah untuk membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik eksternal, memperkenalkan produksi, meningkatkan jumlah langganan, dan sebagainya.
2. Memelihara komunikasi yang baik (*maintain good communication*). Pelaksanaan tugas dari Humas untuk melaksanakan komunikasi.

Salah satu tugas Humas ialah sebagai sumber informasi (*source of information*) dan sebagai saluran informasi (*channel of information*).

3. Menitik-beratkan pola dan tingkah laku yang baik (*and stress good moral and manners*). Dalam hubungannya dengan publik dari organisasi sangat perlu untuk diperhatikan moral dan tingkah laku yang baik untuk menjaga keharmonisan komunikasi yang diharapkan dapat menjaga citra organisasi.

Peran Humas dapat bersifat dua arah yaitu berorientasi ke dalam (*inward looking*) dan berorientasi ke luar (*outward looking*). Menurut Rosady Ruslan (2006 : 23-24) mengemukakan beberapa kegiatan dan sasaran PR, yaitu sebagai berikut :

1. Membangun identitas dan citra perusahaan (*Building corporate identity image*) yaitu menciptakan identitas perusahaan yang positif dan mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dan dua arah dengan berbagai pihak.
2. Menghadapi krisis (*facing of crisis*) yaitu menangani keluhan (*complaint*) dan menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk manajemen krisis dan PR *recovery of image* yang bertugas memperbaiki *lost of image and damage*.
3. Mempromosikan Aspek Kemasyarakatan (*promotion public causes*) yaitu dapat dilakukan dengan mempromosikan yang menyangkut kepentingan publik dan dengan mendukung kegiatan kampanye yang bersangkutan dengan aspek kemasyarakatan, seperti kampanye anti narkoba dan sebagainya.

Ada lima pokok tugas *Public Relations* sehari-hari, diantaranya sebagai berikut (Rumanti, 2002 : 41-42) :

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi secara lisan, tertulis, melalui gambar (*visual*) kepada publik, agar publik mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan, tujuan serta kegiatan yang dilakukan.

2. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat. Disamping itu, menjalankan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama dengan lingkungan.
3. Memperbaiki citra organisasi. Bagi PR, menyadari citra yang baik tidak hanya terletak dari bentuk gedung, presentasi, publikasi dan lainnya, tetapi terletak pada bagaimana organisasi bisa mencerminkan organisasi yang dipercayai, memiliki kekuatan, mengadakan perkembangan secara berkesinambungan yang selalu terbuka untuk dikontrol, dievaluasi, dan dapat dikatakan citra tersebut merupakan gambaran komponen yang kompleks.
4. Tanggung jawab sosial. PR merupakan instrumen untuk bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap tanggung jawab tersebut. Terutama kelompok publik sendiri, publik internal dan pers.
5. Komunikasi. PR mempunyai bentuk komunikasi yang khusus, komunikasi timbal balik, maka pengetahuan komunikasi menjadi modalnya. Dalam fungsinya komunikasi itu sentral. Perlu juga untuk dimiliki oleh pengetahuan manajemen dan kepemimpinan serta struktur organisasi.

Fungsi staf Humas adalah mewakili publik pada manajemen dan manajemen pada publik sehingga tercipta arus komunikasi dua arah, baik bagi informasi maupun perilaku. Secara otomatis fungsi Humas termasuk fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan sentral lembaga (Cutlip and Centre dalam Rosady Ruslan, 2006 :25).

Berbicara fungsi berarti berbicara masalah kegunaan Humas dalam mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Dua fungsi PR yaitu (Astuti, 2002:23) :

1. Fungsi Konstruktif.

Djanalis Djanaid (1993) menganalogikan fungsi sebagai “perata jalan”. Jadi, Humas merupakan “garda” terdepan yang dibelakangnya dari

rombongan tujuan-tujuan perusahaan. Ada tujuan marketing, tujuan produksi, tujuan personalia, dan sebagainya. Peranan Humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi atau lembaga. Humas menyiapkan mental organisasi/lembaga untuk memahami kepentingan publik. Humas mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi untuk direkomendasikan kepada manajemen. Humas menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik organisasi/lembaga yang diwakili. Fungsi konstruksi ini mendorong Humas membuat aktivitas maupun kegiatan-kegiatan terencana, berkesinambungan, yang cenderung bersifat proaktif.

2. Fungsi Korektif.

Dalam fungsi korektif, Cutlip and Center menyatakan bahwa fungsi Humas meliputi hal-hal seperti menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi, menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan, melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi kepentingan umum, dan membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik internal maupun eksternal.

Melvin Sharpe dalam Manajemen Public Relations, Teori dan Aplikasinya (Kasali, 2003:9) mengajukan lima prinsip harmonis dalam hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan publiknya, yaitu :

1. Komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas.
2. Keterbukaan dan konsistensi terhadap langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh keyakinan orang lain.
3. Langkah-langkah yang *fair* untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan *goodwill* (keinginan yang baik).
4. Komunikasi dua arah yang terus menerus untuk mencegah keterasingan dan untuk membangun hubungan.

5. Evaluasi dan riset terhadap lingkungan untuk menentukan langkah atau penyesuaian yang dibutuhkan bagi *social harmony*.

Konsep ini merupakan prinsip-prinsip hubungan manusia modern yang semakin hari semakin menuntut adanya kerjasama, keterbukaan, dan kejujuran. Prinsip-prinsip ini berkembang sehubungan dengan perubahan nilai-nilai perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan perubahan drastis dari teknologi yang mewarnai seluruh kehidupan manusia.

Humas adalah fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara relasi yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Keberhasilan dan kegagalan Humas ini tergantung bagaimana membentuk dan memelihara relasi yang saling menguntungkan itu. Definisi konseptual ini memposisikan banyak aktivitas dan tujuan-tujuan praktik Humas sebagai sebuah fungsi manajemen. Definisi tersebut juga mengidentifikasi pembentukan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya sebagai dasar moral dan etika dalam berprofesi. Pada saat yang sama, definisi tersebut menunjukkan kriteria untuk menentukan bagian dari fungsi.

Format komunikasi yang harus terus dilakukan Polri saat ini adalah menciptakan pesan-pesan instansi untuk merespon sebuah krisis yang sedang menimpanya. Format tersebut menurut Coombs (Putra, 1999:102) diantaranya :

1. *Mortification Strategies*, yakni institusi mencoba memohon maaf dan menerima kenyataan bahwa memang benar-benar terjadi krisis.
2. *Remediation* yakni institusi bersedia untuk memberikan sejumlah kompensasi terhadap korban.
3. *Rectification*, yakni institusi mengambil tindakan yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis yang berkelanjutan.

Apabila ketiga format komunikasi tersebut terus digencarkan lembaga Humas Polri saat ini, maka dalam jangka panjang akan mengembalikan citra dan wibawa lembaga di tengah terpaan krisis kepercayaan. Sudah saatnya seluruh jajaran maupun anggota Polri dibekali

dan ditanamkan naluri kehumasan, bahkan semakin mendesak perlunya lembaga Humas sebagai lembaga mandiri dan strategis secara struktural di institusi Polri hingga tingkat kecamatan.

2. Program Kehumasan dalam Perspektif Manajemen Strategik

Dikaitkan dengan pemahaman Manajemen Humas (*Management of Public Relations*), apabila ditinjau dari segi selain fungsi manajemen dan fungsi dalam kegiatan komunikasi, yakni merupakan faktor utama yang dapat menentukan kelancaran proses Manajemen dalam fungsi Kehumasan dari lembaga yang diwakilinya, yaitu pada umumnya melalui fungsi atau beberapa tahapan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengawasan (*controlling*), dan penilaian (*evaluating*) (Wasesa. 2006).

Fact finding digunakan untuk mengetahui bagaimana citra institusi/lembaga di mata masyarakat. Kegiatan *fact finding* diharapkan agar manajemen akan mengetahui gambaran yang obyektif tentang lembaganya di mata masyarakat. Gambaran yang obyektif ini hanya bisa didapatkan melalui *research*/penelitian. Hasil *research* akan dimanfaatkan sebagai landasan kegiatan manajemen untuk kegiatan komunikasi yang akan dilakukan oleh humas. Hasilnya berupa dokumentasi, data-data terbuka (secara sosial dapat dilihat). *Fact finding* juga merupakan pedoman manajemen secara keseluruhan. Berdasarkan data/fakta yang diperoleh melalui *fact finding*, dibuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi (Hunger & Wheelan. 2003).

Dalam melakukan strategi pemulihan citra perusahaan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh praktisi *Public Relations* seperti :

- a. Penelitian dan Mendengarkan (*research-listening*). Penelitian yang berkaitan dengan opini, sikap, dan reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan suatu organisasi. Kemudian melakukan pengevaluasian dari fakta-fakta dan informasi yang masuk untuk menentukan keputusan selanjutnya. Pada

tahap ini akan menetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi, yaitu “apa yang menjadi problem kita”.

- b. Perencanaan dan Mengambil Keputusan (*planning-decision*). Tahap ini memberikan sikap, opini, ide-ide, dan reaksi yang berkaitan dengan kebijaksanaan serta termasuk menetapkan program kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan-keinginan pihak yang berkepentingan.
 - c. Pelaksanaan dan Mengkomunikasikan (*action-communication*). Tahap ini adalah menjelaskan dan sekaligus mendramatisir informasi mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan, sehingga mampu menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif akan dapat mempengaruhi bagi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi dalam upaya memberikan dukungan sepenuhnya.
 - d. Mengevaluasi (*evaluating*). Pihak *Public Relations* mengadakan evaluasi terhadap hasil dan program kerja atau aktivitas PR yang telah dilaksanakan, serta keefektivitasan dari teknik-teknik manajemen, dan komunikasi yang telah dipergunakan (Suhandang, 2004 : 142).
- a. Persepsi dan Citra**

Sebuah citra dimata publik dapat terlihat dari pendapat atau pola pikir pada saat kita mempersepsikan realitas yang terjadi. Realitas didapat dari media massa atau media-media lain yang berhubungan langsung dengan publik yang bisa dianggap mewakili persepsi yang lebih besar yakni seluruh masyarakat. Dengan begitu, satu hal yang perlu dipahami dari suatu citra adalah adanya persepsi yang berkembang dalam benak publik terhadap realitas yang ada. Sebuah realitas dapat dipersepsikan berbeda oleh setiap individu, dan juga bisa dipersepsikan berbeda oleh anggota publik yang berbeda.

Menurut Kotler dalam *Marketing Management* (1999), mengidentifikasi persepsi sebagai sebuah proses dimana seseorang melakukan seleksi, mengorganisasi, menginterpretasi informasi-informasi

yang masuk ke dalam pikirannya menjadi sebuah gambar besar yang memiliki arti. Persepsi tidak tergantung pada stimulasi fisik saja, tetapi juga terhadap stimuli lain yang didasarkan pada situasi dan kondisi yang dimiliki seseorang secara pribadi. Seberapa jauh citra akan terbentuk sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana Humas mampu membangun persepsi yang didasarkan oleh realitas yang terjadi. Sekalipun persepsi belum tentu sama dengan realitas yang muncul tetapi realitas tidak bisa dibangun tanpa realitas yang mendasar.

Persepsi, realitas, dan citra harus dibangun dengan fondasi kredibilitas. Persepsi, realitas, dan citra yang tidak didasari informasi realitas dengan kredibilitas tinggi hanya akan menghasilkan citra yang lemah. Resiko yang diakibatkan oleh informasi yang tidak kredibel adalah banyaknya celah yang bisa dilihat oleh publik, termasuk pihak lain yang memiliki kepentingan berseberangan, untuk dengan mudah mengubah citra menjadi negatif (Wasesa, 2006:15).

Humas memiliki fungsi dan tugas pokok sebagai *image builder* (pembangunan citra) dari sebuah institusi. Institusi yang baik, menempati hati atau tertanam dalam benak (*mindset*) para pelanggan adalah institusi yang mempunyai citra positif. Setiap citra positif yang ditampilkan oleh institusi terhadap publiknya membuat publik meletakkan keyakinannya pada institusi tersebut. Humas juga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai jembatan antara institusi dengan publiknya.

Meskipun krisis citra sering diakibatkan oleh krisis manajemen, tetapi bukan berarti begitu manajemen selesai maka krisis juga dengan sendirinya usai. Suatu hal yang sering terjadi dalam krisis citra berkembang jauh lebih besar daripada kenyataan yang terjadi di lapangan. Itulah sebabnya pada tingkat penanganan krisis, barometer penyelesaian sebuah krisis bukan terletak pada selesai atau tidaknya masalah krisis manajemen, tetapi lebih jauh lagi harus melihat apakah citra tersebut di mata publik sudah membaik atau belum (Wasesa, 2006:42).

Itulah sebabnya, begitu krisis citra mulai muncul, yang pertama harus dilakukan adalah membuat peta persepsi yang berkembang. Pada tahap ini, opini tidak lagi bisa dibentuk dengan model satu arah. Pengembangan opini harus didasarkan pada opini yang berkembang dalam wacana publik, kemudian disesuaikan dengan tujuan penyelesaian krisis citra tersebut.

Menurut Sukatendel (1990) dalam Ardianto (2004) mendefinisikan Humas sebagai suatu metode komunikasi untuk penciptaan citra positif dari mitra institusi atas dasar kesadaran untuk menghormati kepentingan bersama.

b. Komunikasi Persuasif

Komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung maupun tak langsung, serta mengandung suatu tujuan, untuk memberitahu atau mengubah sikap (*attitude*), pendapat (*opinion*) atau perilaku (*behaviour*). Sedangkan asal kata persuasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*Persuasion*" yang berinduk kepada kata kerja "*to persuade*" artinya membujuk, merayu dan menghimbau. Kegiatan untuk membujuk, merayu dan menghimbau atau sejenisnya adalah merangsang seseorang untuk melakukan sesuatu dengan spontan, dengan senang hati dengan sukarela tanpa merasa dipaksa (Effendy. 2000).

Menurut Ernest G dan Nancy C. Borman, memberikan pengertian persuasif sebagai berikut

1. Persuasif merupakan komunikasi untuk mempengaruhi pilihan seseorang.
2. Persuasif adalah komunikasi yang dimaksudkan untuk mendapat respons dari penerima, untuk mengubah sikap atau keyakinan pendengar, dimana sumber pesan, serta orang yang memberikan tanggapan ataupun pidato yang bersifat persuasif, mempunyai tujuan

khusus dan menampilkan pesan yang bersifat membujuk untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Persuasif tidak sama dengan paksaan, dimana paksaan akan menenyapkan pilihan sedangkan bujukan akan mempengaruhi pilihan.

Persuasif merupakan salah satu metode komunikasi sosial dan dalam penerapannya menggunakan teknik/ cara tertentu. Bahwa pada dasarnya persuasif, menunjukkan pada metode komunikasi yang menggerakkan serta melakukan sesuatu dengan rasa senang, rasa sukarela tanpa mempunyai perasaan disuruh/dipaksa oleh orang lain. Caranya adalah dengan ajakan, himbauan, rayuan dan meminta.

Beberapa metode persuasif adalah sebagai berikut :

1. Asosiasi (*association*) artinya teknik ini menyangkutkan kepada sesuatu peristiwa atau seseorang yang tenar, sedang populer yang ramai dibicarakan secara positif.
2. Menumbuhkan kekhawatiran yang merangsang dengan kehendak sendiri melakukan sesuatu pemecahan (*fear arousing*). Artinya teknik ini bukanlah menimbulkan rasa takut, tegang atau sejenisnya, tetapi pada dasarnya teknik ini bersifat sugesti yang menimbulkan kepada si penerima sugesti, tanpa dipaksa melakukan sesuatu.
3. Mengubah pendapat dengan harapan, bahwa dengan perubahan itu akan mendapat manfaat (*pay off idea*). Artinya bahwa manusia pada dasarnya karena pendapat ataupun pengalamannya tidak jarang melakukan sesuai orang lain dapat memberikan saran atau usul yang kalau diterimanya akan memberikan suatu manfaat padanya.
4. Menimbulkan keinginan, kehendak untuk memilih atau melakukan sesuatu yang diistilahkan sebagai *icing device and red herring* atau disebut sebagai *iming-iming*.
5. Menumbuhkan partisipasi serta peran serta (Sastropoetro. 1988)

Pada dasarnya beberapa teknik diatas dijelaskan mengenai cara ataupun metode membujuk/mempersuasi orang lain, namun didalam

komunikasi persuasi diharapkan adanya suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mengubah, serta mempunyai efek terhadap individu.

Efek utama dari komunikasi persuasif adalah menstimulasikan individu untuk berpikir sekaligus mengenai dua hal, yaitu pendapat asalnya dan pendapat baru yang direkomendasikan melalui komunikasi yang berkenan.

Demi berhasilnya komunikasi persuasif perlu dilaksanakan secara sistematis, dengan menggunakan formula yang biasa disebut AIDDA yang dijadikan landasan pelaksanaan. Formula AIDDA merupakan kesatuan singkatan dari tahap-tahap komunikasi persuasifnya sebagai berikut :

A – Attention – Perhatian

I – Interest – Minat

D – Desire – Hasrat

D – Decision – Keputusan

A – Action – Kegiatan

Formula tersebut seringpula disebut *A-A Procedure* sebagai singkatan dari *Attention –Action Procedure*, yang berarti agar komunikasi dalam melakukan kegiatan dimulai dengan menumbuhkan perhatian (Ernest & Borman. 1991).

Berdasarkan formula AIDDA, komunikasi persuasif dimulai dengan upaya perhatian. Upaya ini tidak hanya dilakukan dalam gaya bicara dengan kata-kata yang baik tetapi juga dalam hal penampilan ketika menghadapi khalayak. Apabila perhatian sudah berhasil dibangkitkan, dilanjutkan dengan upaya menumbuhkan minat. Upaya ini bisa berhasil dengan mengutarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan komunikasi. Karena itu, komunikator harus mengenal siapa komunikasi yang dihadapinya.

Tahap berikutnya adalah memunculkan hasrat pada komunikasi untuk melakukan ajakan, bujukan, atau rayuan komunikator, sehingga pada tahap berikutnya komunikasi mengambil keputusan untuk melakukan suatu kegiatan sebagaimana yang diharapkan dari komunikator .

F. Metode Penelitian

1. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Moleong (2001 : 30) dalam paradigma ini manusia dianggap sebagai makhluk unik yang memiliki motif atau makna yang berbeda-beda terhadap setiap perilaku yang dilakukannya. Danim (2002 : 42) menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Langkah umum penelitian deskriptif yaitu mendefinisikan masalah secara spesifik, merumuskan masalah atau desain pendekatan, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menyusun laporan penelitian.

2. Jenis Riset

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Singarimbun & Effendi (1986:4) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu, seperti interaksi sosial, sistem kekerabatan, dan lain-lain. Penelitian deskriptif biasanya dilakukan tanpa menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Sedangkan menurut Kountor (2003:105-106) penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Ciri-ciri penelitian deskriptif yaitu berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat ini, menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu dan variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan.

Menurut Rahmat (2001:24-25) metode penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah dan kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi,

dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dengan pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai salah satu bagian dari penelitian, merupakan unsur yang sangat penting. Bagian dari metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber dan Jenis Data

Data primer

Menurut Umar (1998:99) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis memperoleh data secara langsung dari unit Humas Polres Muna Sulawesi Tenggara mengenai program *Community Policing* dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menunjang hubungan yang efektif antara Polisi dan masyarakat yang secara bekerjasama menciptakan kondisi lingkungan yang tertib dan aman.

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung. Wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan, baik yang telah direncanakan maupun nantinya muncul sendiri secara spontan.

Tujuan dalam melakukan wawancara adalah untuk menunjukkan konstruksi saat ini dalam suatu konteks menjadi pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, tanggapan atau persepsi, motivasi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya. Hal ini diperlukan untuk merekonstruksi beragam hal sebagai bagian dari pengalaman masa lalu, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang (Sutopo, 2002 : 58).

Data Sekunder

Menurut Umar (1998:100) data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data tersebut diperoleh dari buku-buku, literatur, referensi, *website*, dokumen, brosur, ataupun sumber lain yang relevan dengan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan membaca literatur yang menyajikan data sesuai dengan permasalahan. Data yang diperoleh melalui dokumen baik dari institusi yang diteliti maupun dari umum seperti buku, situs internet, hasil wawancara pengamatan secara langsung.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bersifat deskriptif. Data pada umumnya berbentuk uraian atau kalimat-kalimat, merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana adanya sumber data, dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Nawawi & Hadani, 19992 : 213).

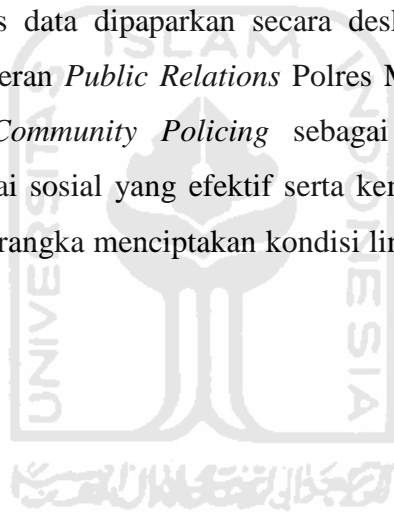
Menurut Idrus (2007 : 181-183) komponen analisis data berupa:

- a. Pengumpulan data. Kebanyakan data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata, fenomena, foto-foto, kondisi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh hasil wawancara, observasi, maupun studi pustaka.
- b. Reduksi data. Reduksi merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan ketika melakukan penelitian di lapangan. Proses ini bukan proses yang sekali jadi namun akan berulang selama proses penelitian kualitatif berlangsung. Proses ini bertujuan lebih menajamkan, mengarahkan dan membuang bagian data

yang tidak perlu serta pengorganisasian data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

- c. Penyajian data. Proses ini merupakan penyajian data-data hasil penelitian yang telah melalui reduksi. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan langkah yang harus dilakukan.
- d. Penarikan kesimpulan. Peneliti akan mengambil kesimpulan dari hasil data-data yang telah diperoleh. Kesimpulan ini akan lebih memperjelas sesuatu yang awalnya masih belum jelas dan kemudian meningkat menjadi lebih rinci.

Hasil analisis data dipaparkan secara deskriptif komparatif untuk menggambarkan Peran *Public Relations* Polres Muna Sulawesi Tenggara dalam program *Community Policing* sebagai upaya meningkatkan hubungan nilai-nilai sosial yang efektif serta kemitraan antara Polisi dan masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib.



BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Kabupaten Muna adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia dengan Ibu kota di Raha. Kabupaten Muna merupakan daerah kepulauan yang terletak di jazirah Sulawesi Tenggara meliputi bagian utara Pulau Buton dan Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar disekitarnya yaitu Pulau Tobeia Kecil, Pulau Tobeia Besar, Pulau Wataitonga, Pulau Bakealu, Pulau Koholifano dan gugusan Kepulauan Tiworo yang terdiri dari Pulau Maginti, Pulau Balu, Pulau Katela, Pulau Mandike, Pulau Bero, Pulau Bangko, Pulau Manoang, Pulau Gala, Pulau Kajuangin dan Pulau Tobuan.

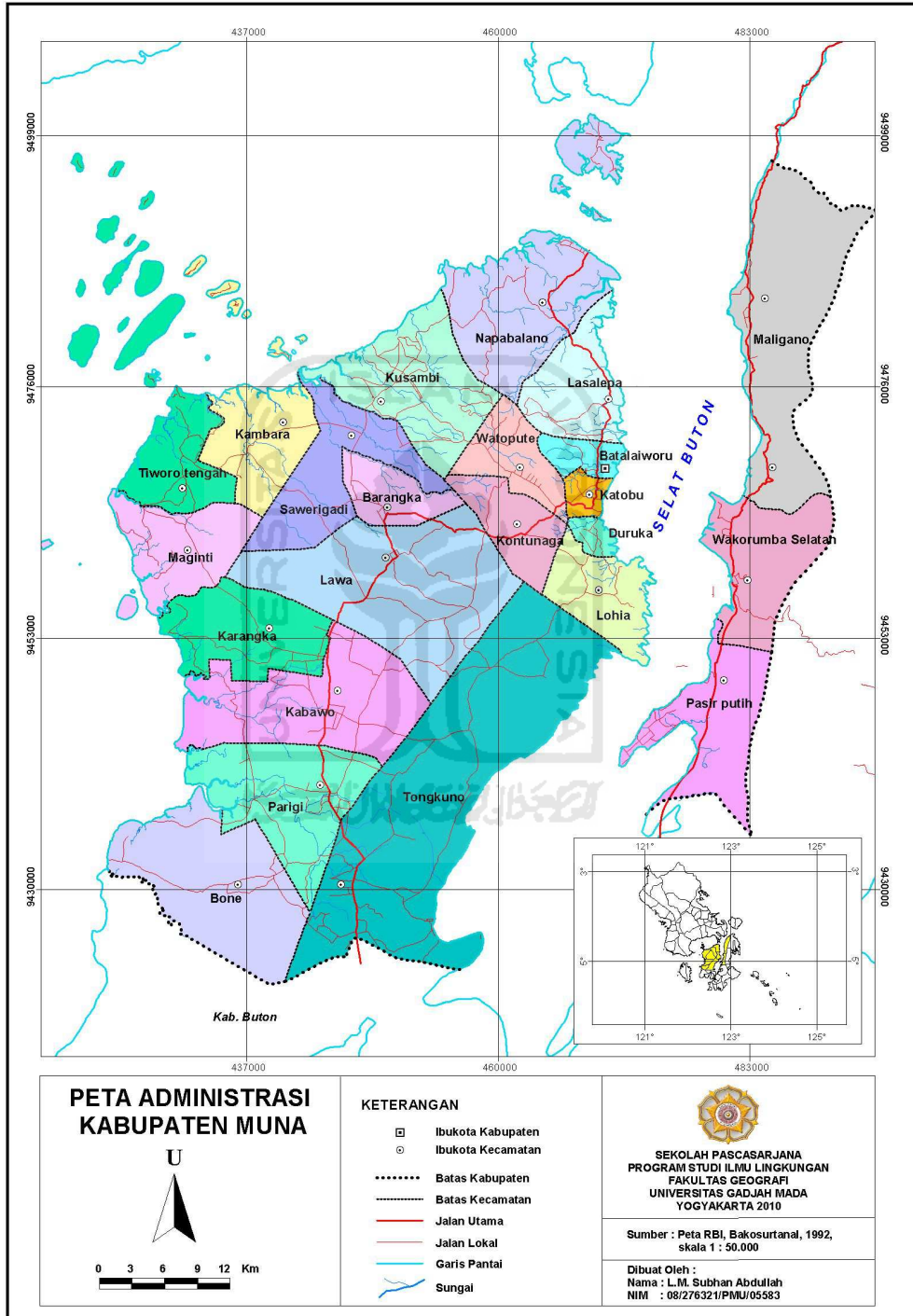
Secara Geografis Kabupaten Muna antara $40^{\circ} 6' LS$ — $50^{\circ} 15' LS$ dan antara $122^{\circ} BT$ — $123^{\circ} 15' BT$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Kendari.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Spelman

Adapun luas Kabupaten Muna adalah sekitar 2.963,97 Km² secara administratif terdiri dari 33 Kecamatan, 205 desa dan 31 Kelurahan serta 3 UPT.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2008 maka sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Muna dimekarkan sehingga ada penambahan sebanyak 10 Kecamatan baru hasil pemekaran. Kecamatan yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Napabalano, Kecamatan Kusambi, Kecamatan Tikep, Tiworo Tengah, Kecamatan Tongkuno, Maginti, Sawerigadi, Lawa, Kabangka, Bone, Pasir Putih, Maligano dan Wakorsel.

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Muna



Sumber : Peta RBI, Bakosurtanal, 1992. Skala 1 : 50.000

Tabel 2. 1
Jumlah Kecamatan Di Kabupaten Muna

Berdasarkan Jumlah Penduduk Dan Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah Penduduk	J u m l a h R u m a h T a n g g a
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Tongkuno	6,257	7,086	3,229	13,343
2	Tongkuno Selatan	2,227	2,664	1,234	4,891
3	Parigi	4,712	5,401	2,475	10,113
4	Bone	2,223	2,537	1,164	4,760
5	Marobo	2,693	2,958	1,158	5,651
6	Kabawo	5,231	6,052	2,579	11,283
7	Kabangka	4,095	4,377	2,136	8,472
8	Kontukowuna	1,595	1,871	835	3,466
9	Tiworo Kepulauan	2,842	3,097	1,513	5,939
10	Maginti	3,733	3,887	1,839	7,620
11	Tiworo Tengah	2,985	3,042	1,579	6,027
12	Tiworo Selatan	2,248	2,229	1,152	4,477
13	Tiworo Utara	2,195	2,305	975	4,500
14	Lawa	3,114	3,779	1,741	6,893
15	Sawerigadi	2,766	3,063	1,455	5,829
16	Barangka	2,498	3,054	1,383	5,552
17	Wadaga	2,424	2,861	1,310	5,285
18	Kusambi	4,683	5,234	1,873	9,917
19	Kontunaga	3,346	3,722	1,733	7,068
20	Watopute	5,193	5,664	2,645	10,857

21	Katobu	12,115	13,912	5,840	26,027
22	Lohia	5,659	6,664	2,871	12,323
23	Duruka	4,947	5,427	2,431	10,374
24	Batalaiworu	5,525	6,199	2,619	11,724
25	Napabalano	4,809	5,192	2,323	10,001
26	Lasalepa	4,428	4,842	2,346	9,270
27	Napano Kosambi	2,135	2,224	974	4,359
28	Towea	2,108	2,266	1,019	4,374
29	Wakorumba Selatan	1,857	2,047	893	3,904
30	Pasir Putih	1,746	2,926	860	4,672
31	Pasir Kolaga	1,653	1,921	840	3,574
32	Maligano	2,295	2,436	1,104	4,731
33	Batukara	979	1,102	505	2,081
	KAB. MUNA	117,316	132,041	58,633	249,357

Sumber: Kabupaten Muna Dalam Angka 2010

A. Sejarah *Community Policing* di Indonesia

Model *Community Policing* merupakan bentuk perpolisian yang saat ini diterapkan di Amerika dan dikembangkan oleh banyak negara. *Community Policing* berbeda dengan model perpolisian militeristik yang umumnya terdapat di negara berkembang. Negara-negara Barat pun berkesimpulan untuk menerapkan model *Community Policing* karena berdasarkan hasil penelitian, mereka merasakan tidak cukup efektifnya model perpolisian yang mereka jalankan selama ini, seperti patroli preventif, reaksi cepat terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan dan kegiatan investigasi kejahatan, oleh karena itu mereka beranggapan bahwa perlu dibentuk kemitraan dengan masyarakat untuk memberantas kejahatan.

Dalam upaya merengkuh konsep *Community Policing* ke dalam ranah perpolisian, digagaslah reformasi kepolisian yang bersifat paradigmatik, yang kemudian menghadirkan:

- a) *Problem Oriented Policing (POP)/ Problem Solving Policing* yaitu Perpolisian yang diselenggarakan dari dan oleh jajaran kepolisian untuk memecahkan permasalahan kamtibmas dan/atau kriminalitas yang didefinisikan oleh publik.
- b) *Community Oriented Policing* yaitu Perpolisian yang diselenggarakan dari dan oleh jajaran Kepolisian untuk kepentingan publik, dengan segala permasalahannya, tidak hanya terbatas pada pemecahan permasalahan kamtibmas dan/atau kriminalitas yang didefinisikan oleh publik.
- c) *Community Based Policing* yaitu Perpolisian yang diselenggarakan dari publik, dalam hal ini permasalahan yang dihadapi oleh publik bisa saja didefinisikan oleh publik itu sendiri, akan tetapi dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan jajaran kepolisian. (Purwadi Arianto, *Community Policing* Sebagai Gaya Perpolisian Masyarakat suatu tinjauan dalam upaya pencegahan kejahatan, makalah: tanpa tahun, hal. 3.)

Proses reformasi ini terus berkembang sebelum akhirnya sampai pada gagasan mengenai *Community Policing*. Istilah *Community Policing* pertama kali digunakan oleh Kepolisian Jepang pada tahun 2003. Istilah tersebut diilhami dari tulisan David Bayley yang berisi tentang hasil penelitian mengenai sistem

Koban dan *Chuzai-sho* di Jepang. Sistem *Koban* yang merupakan pengganti dari pola Samurai yang sangat militeristik di Jepang ternyata sudah mulai dikembangkan sekitar 110 tahun yang lalu pada masa Meiji. *Koban* dalam istilah Kepolisian di Jepang adalah pos polisi yang terbuka selama 24 jam untuk melindungi masyarakat. Secara harfiah, *Koban* yang berarti terbuka, memiliki arti pos polisi yang selalu terbuka untuk tukar pendapat secara bebas dengan masyarakat.

Chuzaiso adalah pos polisi di daerah pedesaan yang terbuka dengan seorang petugas polisi ada di tengah masyarakat selama 24 jam. Sistem Koban inilah yang menjadi cikal bakal munculnya model *Community Policing* saat ini (<http://denk88.blogspot.com/2009/12/community-policing.html>, diakses tanggal 11 November 2011).

Dengan *Community Policing* maka kepolisian Jepang dapat dikatakan sebagai penegak hukum modern. Predikat tersebut diterapkan bukan hanya dilihat dari adanya berbagai fasilitas pendukung tugas yang serba modern. Akan tetapi mengacu kepada pandangan beberapa pakar penegak hukum tentang konsep penegakan hukum modern. Penegakan hukum modern dimaksud adalah penegakan hukum yang menitikberatkan pada kegiatan preventif dibandingkan tindakan represif.

Secara harfiah konsep *Community Policing* telah melembaga dalam tatanan kehidupan masyarakat lokal di seluruh Indonesia. Mekanisme penyelesaian perkara non yudisial ini sejak lama telah dipraktekkan terutama dalam masyarakat pedesaan. Hanya saja masyarakat lokal kita mempraktekannya secara tradisional. Memang selama ini kita telah mengenal program Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) semacam Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) dan Pamswakarsa (Pengamanan Swakarsa). Begitu juga dengan terbentuknya Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), yang meniru model Babinsa (Bintara Pembina Masyarakat) Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun baik secara konseptual atau pun praktik seperti ini, rasanya tidaklah cocok lagi dengan perkembangan masyarakat sekarang, karena tujuannya adalah hanya membuat masyarakat yang patuh pada aturan-aturan kamtibmas, bukan masyarakat yang sadar akan pentingnya kamtibmas.

Sejak tahun 1970-an di Indonesia tugas-tugas kepolisian ditetapkan: represif (menindak), preventif (mencegah), dan premetif (menangkal). Preemtif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur korelatif kriminogen dari masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan (*police hazard*) atau

berlanjut menjadi ancaman faktual (*crime*). Tugas-tugas premetif dilakukan melalui kegiatan-kegiatan Pembinaan Masyarakat (Binmas) atau Bimbingan Masyarakat (Bimmas). Dari sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya Community Policing sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Sistem Keamanan Swakarsa (Siskam Swakarsa), yaitu sistem keamanan yang muncul dari inisiatif masyarakat. Kemudian konsep ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Dengan kata lain Polri tidak serta merta mengadopsi konsep *Community Policing* yang dikembangkan di negara-negara maju, melainkan mengembangkan pranata yang telah dimiliki yang disesuaikan dengan fungsi penyelenggaraan kepolisian (Buku Pedoman Pelatihan Perpolisian Masyarakat tahun 2003).

Dalam prosesnya lahirnya *Community Policing* di Indonesia, merupakan penyempurnaan konsep, kebijakan, dan praktek pembinaan masyarakat terutama yang dilakukan oleh para Babinkamtibmas. Setelah melalui proses uji coba dan pembentukan model yang dimotori oleh berbagai donor seperti IOM, JICA/Jepang, Asian Foundation, Partnership, dan UNHCR, Polri menerapkan model *Community Policing* ala Indonesia dengan Perpolisian Masyarakat/Polmas (<http://sikatbekasi.wordpress.com/2008/07/25/perpolisian-masyarakat-polmas/>, diakses tanggal 12 November 2011).

Untuk mengetahui dan memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan *Community Policing*, di sini peneliti mengemukakan beberapa pengertian *Community Policing*, yaitu:

- a) *Community Policing* atau Polmas adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Chryshnando. 2003.)
- b) Berdasarkan buku panduan pelatihan Polmas untuk anggota Polri, *Community Policing* atau Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu

kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan.

- c) Berdasarkan Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, *Community Policing* atau Polmas (Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

B. Profil Polres Muna Sulawesi Tenggara

Kepolisian Resor Muna mempunyai tugas dan tanggung jawab utama terhadap stabilitas kamtibmas di wilayah Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara guna mendukung dan mensukseskan kelancaran program pembangunan di dua wilayah Kabupaten tersebut, sebagaimana Tugas Pokok Polri yang tertuang dalam Undang - undang R.I Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I dimana Polri secara umum mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Personel Polres Muna dan Jajaran yang tersebar di Mapolres, 13 Polsek tipe B2, 6 Polsek Persiapan dan 8 Polpos pada bulan Juni 2011 berjumlah 525 orang dengan rincian :

1. Polri : 523 orang
2. PNS Polri : 2 orang

Dilihat dari perjalanan sejarah keberadaan Polisi di Kabupaten Muna senantiasa diwarnai dengan pengaruh pemerintah penjajah, kerajaan sampai kepada pemerintah di zaman kemerdekaan, sehingga mengalami perubahan – perubahan sesuai dengan jamannya. Didalam kenyataannya polisi di Kabupaten muna pada zaman tersebut telah ada dengan nama Polisi Landshap di bawah koordinasi langsung pemerintah Swapraja dan Polisi Basteur dibawah koordinasi pemerintah Belanda.

Polres Muna sekarang membawahi 19 Polsek dan 7 Pospol dgn jumlah personel 525 terdiri dari 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Muna yang di pimpin oleh kepala Polres yaitu AKBP R. Wawan Wirawan, SH dan Kabupaten Buton Utara dengan 29 Kecamatan.

1. Visi Polres Muna

Mengacu pada Visi Polri dan Polda Sultra, maka Visi Polres Muna Tahun 2011 adalah : ”Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Muna”.

2. Misi Polres Muna

Adapun misi dari Polres Muna adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/ operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.

- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam wilayah hukum Polres Muna.
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum dengan melaksanakan Kebijakan Kapolda Sulawesi Tenggara yakni kegiatan Poltramas (Polisi Mitra Masyarakat).
- f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g. Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polres Muna guna mendukung operasional tugas Polri.
- h. Membangun sistem sinergi Polisional Interdepartemen dan lembaga nasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building / networking*).
- i. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan personil Polres Muna yang bersih, berwibawa dan dipercaya masyarakat dengan membangun budaya organisasi yang dekat dengan masyarakat dan humanis.
- j. Mengamankan dan mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara demi terwujudnya keamanan masyarakat di daerah Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara.

3. Tujuan Jangka Menengah Polres Muna

Pencapaian tujuan jangka menengah Polres Muna sebagai sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka melanjutkan strategi *Trust Building* pada Renstra Polres Muna 2010-2014 sehingga tercipta kondisi keamanan yang semakin kondusif di semua titik pelayanan hingga tingkat Polsek melalui Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.

Dalam rangka mewujudkan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima tersebut, maka tujuan jangka menengah Polres Muna 2010 - 2014 adalah :

1. Terbangunnya sistem komunikasi Polres Muna yang berbasis teknologi untuk kecepatan merespon setiap panggilan dan permintaan bantuan dari masyarakat, komunikasi persuasif sampai pengendalian peristiwa kejahatan, perlindungan dan pengayoman masyarakat.
2. Tersebarnya pelayanan Polres Muna kepada masyarakat dengan memperkuat Polsek, sebagai ujung tombak pelayanan keamanan dan Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar.
3. Terpenuhinya hak-hak tersangka yang berlandaskan pada asas praduga tak bersalah sehingga secara berkala menyajikan informasi kepada tersangka tentang perkembangan hasil penyidikan.
4. Meningkatnya pelayanan masyarakat melalui perizinan.
5. Terwujudnya Komunitas Samapta di desa dan kawasan.
6. Terwujudnya pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
7. Terwujudnya kemitraan antara Polres Muna dengan lembaga baik dalam maupun luar wilkum Polres Muna dalam rangka sinergi keamanan yang berorientasi pada tindakan proaktif daripada tindakan reaktif.
8. Terlaksananya peran media massa dalam rangka membangun citra Polri.
9. Tergelarnya peralatan Polri berbasis teknologi.
10. Terpenuhinya jumlah personel untuk mengisi sebaran pelayanan.
11. Tergelarnya personel Polres Muna secara profesional.
12. Terwujudnya sistem hukum Kepolisian Resor Muna yang kokoh.
13. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana Polres Muna khususnya Markas Komando dan perumahan dinas serta pengusulan pengadaan materiil dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional dan pembinaan (Buku Pedoman Pelatihan Perpolisian Masyarakat. 2003)

4. Visi dan Misi Fungsi Pembina Masyarakat/Binmas (Keputusan Kapolri No : KEP/149/III/2010) :

a. Visi

Menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.

b. Misi

1. Hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
2. Membangun komunikasi yang efektif dan intensif dengan masyarakat baik individu kelompok atau komunitas.
3. Mengidentifikasi masalah-masalah sosial dan keamanan yang timbul dalam masyarakat serta menemukan jalan pemecahannya.
4. Bersama masyarakat cegah dan menangkal timbulnya penyakit masyarakat
5. Bersama masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
6. Membangun dusun, kembangkan kemitraan dengan segenap komunitas dalam Harkamtibmas yang kondusif
7. Mendorong peran masyarakat dalam tumbuh kembangnya daya cegah dan daya tangkal terhadap segala bentuk GKTM.

C. Falsafah Perpolisian Masyarakat (Polmas)

Sebagai falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menunjang nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap prilaku yang santun serta saling menghargai antara Polisi dan masyarakat, sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggara fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembinaan dalam konsep Polmas adalah upaya menumbuhkan dan mengoptimalkan potensi masyarakat dalam hubungan kemitraan (*partnership and networking*) yang sejajar.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat Polri dan masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) adalah tempat berupa bangunan/balai yang digunakan untuk kegiatan Polisi dan warga dalam membangun kemitraan. Balai ini dapat dibangun baru atau mengoptimalkan bangunan Polisi yang sudah ada seperti Polsek dan Pospol (Pos Polisi) atau fasilitas umum lainnya.

1. Tujuan *Community Policing*

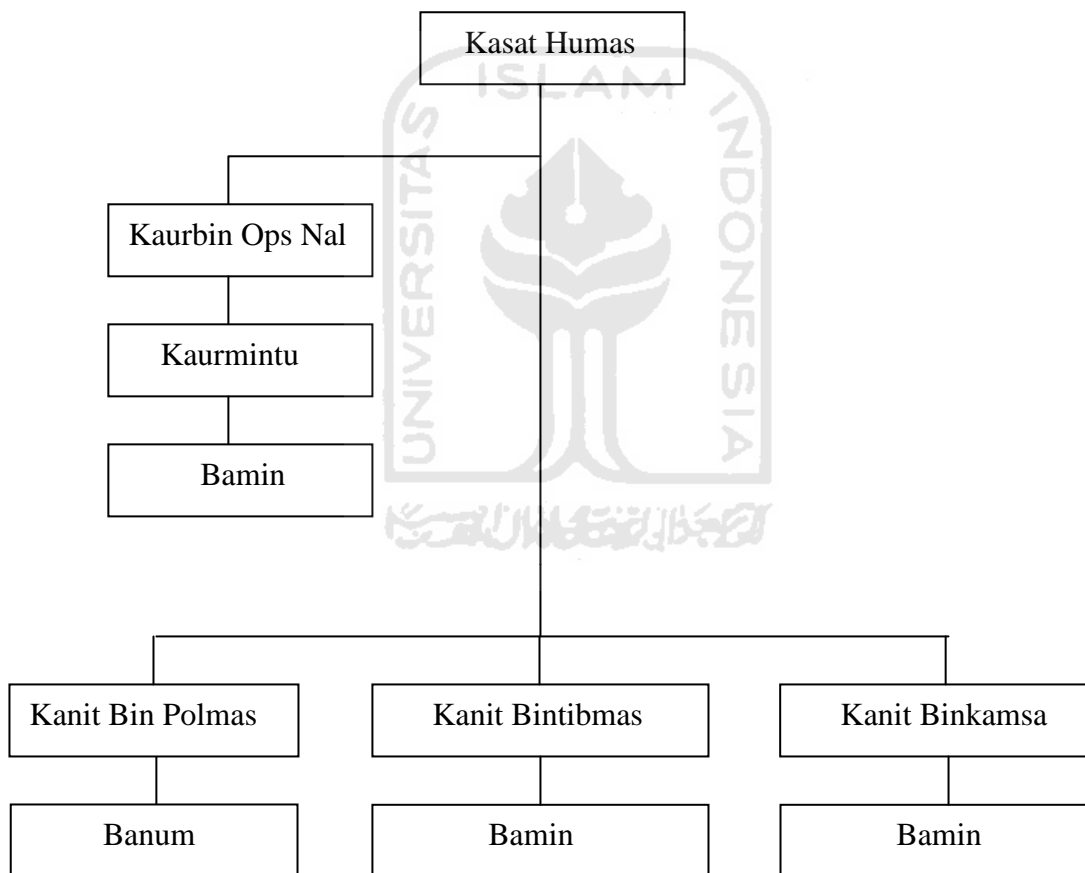
Tujuan diterapkannya Polmas dimaksudkan agar terwujud kebersamaan, kemitraan dan kerja sama antara Polisi dengan masyarakatnya (komunitasnya) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya merupakan program dan strategi melainkan suatu falsafah yang mengeser paradigma gaya perpolisian yang konvensional. Menjadi suatu gaya perpolisian baru dalam masyarakat madani yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan yang menampilkan sikap santun serta saling menghargai antara Polisi dan warga dalam menciptakan kondisi yang menunjang. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk memungkinkan terbentuk dan terbangunnya kerjasama yang menjadi tujuan penerapan Polmas maka sasaran yang harus dicapai adalah membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat dan membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan Polri guna meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta

menciptakan ketentraman dan kedamaian. Polri yang profesional dan dapat dipercaya tercermin dari sikap perilaku segenap Polri, baik dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari komunitas maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari setiap anggota Polri bahwa dalam melaksanakan tugas harus dijiwai dengan semangat. Melayani dan melindungi/mengayomi sebagai suatu kewajiban profesi.

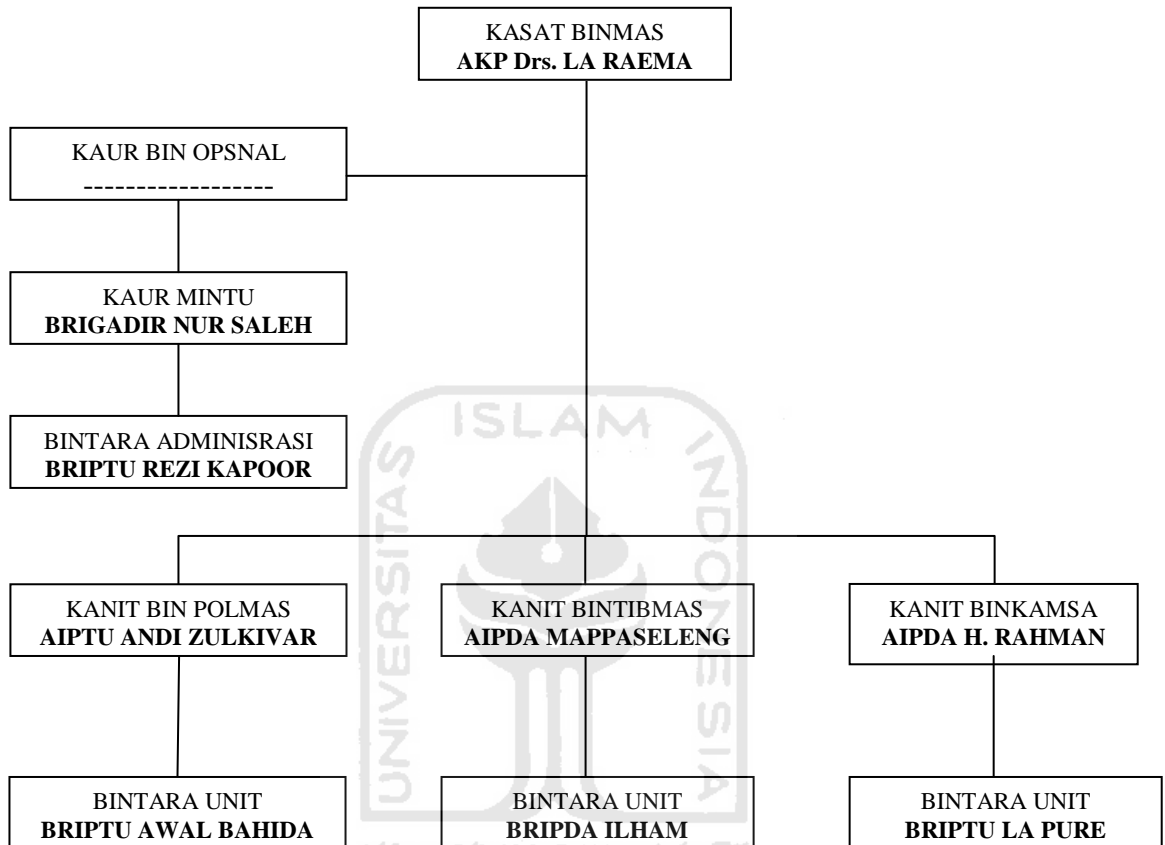
Bagan 2. 1

Struktur Organisasi Humas Polres Muna Sulawesi Tenggara



Bagan 2. 2

Struktur Organisasi Sat Binmas Polres Muna



D. Profil Narasumber

Dalam memperoleh data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Untuk mengetahui program *Community Policing* sebagai strategi Humas Polres Muna Sulawesi Tenggara sebagai penunjang kerjasama antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib, peneliti mengadakan wawancara dengan Kepala Divisi Humas dan salah satu anggota dari divisi Humas tersebut. Sedangkan untuk memperoleh hasil evaluasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kerjasama program *Community Policing*, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi sasaran

program tersebut. Narasumber berikut ini telah dipilih secara acak dan masing-masing mewakili pendapat mengenai program *Community Policing*, yaitu :

1. Narasumber pertama yaitu kepala divisi Humas atau penyampai pesan yaitu Bapak AKP. Masri dan Drs. AKP. La Raema selaku Kepala Sub bagian Binamitra Polres Muna. Peneliti melakukan wawancara secara langsung mengenai strategi Humas Polres Muna dalam program *Community Policing* sebagai penunjang peningkatan kemitraan dengan masyarakat di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.
2. Narasumber selanjutnya yaitu beberapa masyarakat yang dapat mewakili dalam wilayah Muna Sulawesi Tenggara yang menjadi sasaran utama dalam program tersebut.

Tabel 2. 2

Informan Peserta Program *Community Policing*

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Waode Apyranti Saera	26 Tahun	Sarjana Kesehatan Masyarakat	Pegawai Negeri Sipil
2.	Abdul Muin	45 Tahun	SMA	Kepala Desa
3.	Ali Sahabat	34 Tahun	Sarjana Pendidikan	Guru SMA
4.	Bucek	29 Tahun	SMA	Satpam
5.	Adelia Sari	17 Tahun	SLTP	Pelajar

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS

Berikut ini merupakan hasil temuan yang didapat oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dan didukung dengan data sekunder berupa laporan program *Community Policing* Humas Polres Muna Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan kemitraan dengan masyarakat guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib. Tahapan pencapaian sasaran prioritas Polres Muna tahun 2011 sesuai Renstra Polres Muna 2011-2014 adalah menggelar komunitas masyarakat didukung sinergi Polisional dengan elemen-elemen masyarakat serta tercapainya masyarakat patuh hukum melalui perencanaan sosial yang partisipatoris.

Mengembangkan sinergi dan kerjasama antar institusi / departemen baik instansi pemerintah, instansi swasta, TNI dan instansi lainnya guna meningkatkan kemampuan dan memperkuat Intelijen Keamanan Polres Muna dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi untuk pencegahan gangguan keamanan, pengungkapan kasus, jaringan dan sindikat kejahatan. Adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku melalui pembinaan, penyuluhan dan penerangan masyarakat didukung untuk mengusulkan peningkatan kesejahteraan bagi petugas lapangan yang bergerak dalam bidang penyelidikan dan penyidikan baik yang bertugas di ruang kantor maupun dilapangan, agar dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa bertindak secara profesional dan proporsional. Meningkatkan kesadaran anggota untuk lebih proaktif dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan/diskriminatif dan mengoptimalkan fungsi sarana komunikasi yang ada di seluruh Polsek Jajaran dengan baik dan lancar.

A. Kebijakan Polres Muna dalam Program *Community Policing*

Adapun kebijakan-kebijakan Polres Muna dalam program *Community Policing* yaitu melanjutkan Sasaran Prioritas Polres Muna tahun 2010 yang belum selesai sesuai tahapan rencana, melaksanakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam upaya peringatan dan deteksi dini, meningkatkan kehadiran petugas Polri berseragam pada waktu / lokasi rawan kejahatan dan pelanggaran dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Selain itu untuk meningkatkan pengungkapan dan pencegahan 4 (empat) jenis kejahatan terutama kejahatan yang meresahkan masyarakat antara lain; judi, premanisme, narkoba, penyulundupan, perdagangan manusia, kejahatan dunia maya, pembalakan liar, pertambangan tanpa ijin, pencurian hasil laut, kejahatan kerah putih dan kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Melakukan pembinaan terhadap wadah komunitas masyarakat juga menjadi kebijakan dari Polres Muna, sehingga terbentuk komunitas Samapta yang memiliki daya tangkal dan daya cegah terhadap kejahatan dan pelanggaran. Melakukan inovasi dan terobosan guna meningkatkan kualitas pelayanan SSB (murah, mudah, cepat dan etis) dan melakukan rekayasa, turjawali dan penegakan hukum lalulintas dan mengintensifkan forum komunikasi Polisi dan masyarakat serta mengembangkan BKPM, diperlukan pengadaan peralatan dan teknologi informasi Kepolisian khususnya Polsek dan Sub Sektor sebagai unsur terdepan dalam pelayanan guna melakukan penelitian dan pengembangan terhadap personel dan peralatan seiring modernisasi teknologi Kepolisian.

Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan untuk mewujudkan Polri yang bersih, transparan dan akuntabel dan menata kembali seluruh aset Polres Muna baik materil maupun fasilitas secara akurat dalam rangka peningkatan pemeliharaan sehingga masih dapat digunakan dengan layak pakai. Melanjutkan pengusulan peningkatan status 6 Polsek Persiapan Jajaran Polres Muna menjadi Polsek definitif dan peningkatan status 6 Polpos menjadi Polsek Persiapan dan pengusulan pembangunan Mako Polsek yang statusnya

belum hak milik Polri sehingga diharapkan di tahun 2011 tidak ada lagi Mako Polsek yang masih berstatus sewa/ pinjam serta mengoptimalkan fungsi sarana komunikasi SSB yang ada di seluruh Polsek Jajaran dengan baik dan lancar.

Langkah kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kemitraan dengan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara kelembagaan pertahanan dan keamanan.
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga keamanan, yaitu Polri, TNI, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla).
3. Peningkatan kegiatan dan operasi bersama masyarakat serta peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan.
4. Pembangunan upaya pemolisian masyarakat (*community policing*) dan penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Peningkatan penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum (Sapjito. 2007).

Sebagai langkah pemantapan hasil penelitian dan pengembangan material persandian, telah diciptakan prototipe sistem sandi dan peralatan sandi yang memberikan jaminan keamanan bagi terselenggaranya jaring komunikasi sandi di seluruh instansi pemerintah. Hal ini didukung dengan pengadaan alat laboratorium, perekayasa perangkat lunak persandian, perekayasa peralatan sandi, penelitian penguasaan teknologi, dan penelitian peralatan sandi.

Telah terjalin kerja sama internasional dalam rangka menjawab tantangan global dan semua bentuk gangguan keamanan yang tidak lagi mengenal batas negara (*borderless crime*), kerja sama internasional merupakan jawaban bagi seluruh penegak hukum di dunia untuk bangkit memerangi kejahatan yang bersifat trans nasional. Kerja sama internasional

teknis profesional penanggulangan kejahatan juga telah dilakukan dengan Jerman (GSG), Jepang (JICA), dan Amerika Serikat (ICITAP, ATA, DEA). Selanjutnya, dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, maka telah ditempatkan perwira penghubung (LO/SLO) di berbagai negara, antara lain, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Australia. Dalam rangka kerja sama pendidikan, telah dikirim sebanyak 1.082 personel Polri untuk menempuh pendidikan di mancanegara serta kerja sama dengan negara-negara donor (*partnership*) dan kerja sama operasional, terutama dengan negara-negara yang berbatasan langsung, khususnya Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia dan Selandia Baru (<http://www.komisikepolisian.com>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2011).

Sasaran yang harus dicapai adalah membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat dan membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan Polri termasuk dengan pemerintah daerah dan TNI meniadakan gangguan. Penerapan Polmas secara lokal tidak berarti bahwa prosesnya hanya dilakukan terbatas pada tataran operasional tetapi harus berlandaskan pada kebijakan yang komprehensif mulai dari tataran konseptual pada level manajemen puncak sampai tingkat pelaksana di lapangan. Sebagai suatu pendekatan yang bersifat komprehensif maka kebijakan penerapan Polmas menyangkut bidang-bidang organisasi atau kelembagaan, manajemen SDM, manajemen logistik, dan manajemen anggaran, serta manajemen operasional Polri.

Model penerapan Polmas yaitu strategi Polmas sebagai wujud perkembangan kepolisian moderen dalam negara demokrasi plural yang menjunjung tinggi HAM diterapkan melalui model-model Polmas yang dikembangkan melalui modifikasi Pranata Sosial dan Pola pemolisian masih Tradisional, intensifikasi fungsi Polri dibidang pembinaan masyarakat da penyesuain model *Community Policing* dari negara-negara lain.

Model Polmas yang diterapkan di suatu kewilayahan tidak selalu sama dengan model Polmas yang diterapkan di kewilayahan lainnya. Penerapan

model Polmas di kewilayahan di sesuaikan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran Polmas yang ditentukan oleh masing-masing pimpinan SATWIL yang berwenang.

Pola Operasional Polmas yaitu upaya pemecahan masalah meliputi gangguan Kamtibmas dengan lebih mengutamakan proses mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan dan mengevaluasi efektifitas tindakan bersama dengan masyarakat. Kepada masyarakat diwujudkan tujuh dimensi pelayanan masyarakat yang mencakup komunikasi berbasis kepedulian, tanggap, cepat dan tepat, kemudahan pemberian informasi, prosedur yang efisien dan efektif, biaya yang formal dan wajar, kemudahan penyelesaian urusan, lingkungan tempat kerja yang kondusif. Upaya penegakan hukum lebih diutamakan kepada sasaran peningkatan kesadaran hukum daripada penindakan hukum dan upaya penindakan hukum merupakan alternatif yang paling akhir, bila cara pemulihan masalah atau cara pemecahan masalah yang bersifat persuasif tidak berhasil.

Alasan penerapan Polmas yaitu pola operasional yang bertumpuk pada peningkatan jumlah Polisi atau intensitas kegiatan Polisi tidak mampu mengatasi atau menekan angka gangguan Kamtibmas di masyarakat. Selain itu perpolisian lebih efektif dengan mengalihkan pendekatan konvensional ke moderen. Menekankan upaya pemecahan akar masalah secara proaktif bersama masyarakat. Praktek keterlibatan masyarakat tradisional dalam pemolisian dikenal di Indonesia. Contohnya ronda kampung, jogo boyo, Jogo Tirto, Pecalang, dan sebagainya. Penyelesaian masalah melalui adat sudah umum diterapkan di masyarakat Tradisional. Contohnya kesemuanya asas kemitraan, kebersamaan, dan keharmonisan.

Manfaat penerapan Polmas yaitu jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio Polisi dan penduduk yang idealpun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya keamanan dan

ketertiban masyarakat. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Menutupi kekurangan personal Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara (<http://www.komisikepolisianindonesia.com>, diakses 12 Agustus 2011).

Penerapan Polmas dengan pendekatan proaktif mengutamakan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dan masalah sosial berarti mengoptimalkan sumber daya Polisi dan masyarakat dengan mengadakan kekuatan sumber daya yang dapat dilibatkan dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas. Dengan pengggandaan kekuatan tersebut, tugas pemeliharaan Kamtibmas tidak hanya dilaksanakan oleh petugas Polri melainkan juga menjadi kepedulian warga masyarakat. Perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat serta berbagai dampak globalisasi pada masyarakat menimbulkan masalah yang semakin kompleks dan meluas, yang sangat mungkin terjadi diberbagai tempat. Perkembangan ini menuntut pemecahan masalah dan penanganan yang cerdas, kreatif dan cepat yang tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh Polri kecuali dengan partisipasi dan bantuan warga masyarakatnya.

Kemitraan polisi dan masyarakat di dalam Polmas memungkinkan deteksi dini permasalahan, karena Polisi dapat lebih cepat dan akurat memperoleh informasi tentang Kamtibmas, sehingga memungkinkan tindakan dan penanganan yang tanggap, cepat dan tepat dan baik oleh Polisi bahkan dalam keadaan mendesak masyarakat dapat mengambil tindakan yang pertama secara cepat dan tepat sebelum Polisi datang. Penerapan strategi Polmas bagi Indonesia sangat tepat dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan kehidupan berkomunitas, gotong royong, keseimbangan (harmonis), dan kepedulian serta mendahulukan kepentingan umum.

Tujuan Polmas yaitu terwujudnya kemitraan Polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tenang serta meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat. Upaya menganggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat sebagaimana mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan dan tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius.

Falsafah Polmas mendasari pemahaman bahwa masyarakat bukan merupakan objek pembinaan dari petugas yang berperan sebagai subjek penyelenggara keamanan, melainkan masyarakat harus menjadi subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia. Falsafah Polmas mendasari pemahaman bahwa penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil bila hanya ditumpukan kepada keaktifan petugas Polisi semata, melainkan harus lebih ditumpukan kepada kemitraan petugas dengan warga masyarakat yang bersama-sama aktif mengatasi permasalahan di lingkungan. Menghendaki agar petugas Polri di tengah masyarakat tidak berpenampilan sebagai alat hukum atau pelaksana undang-undang masyarakat dan tidak berpenampilan sebagai alat hukum atau pelaksana undang-undang yang hanya menekankan penindakan hukum atau mencari kesalahan warga, melainkan lebih menitikberatkan kepada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, agar warga masyarakat tergugah kesadarannya dan kepatuhan hukumnya. Oleh karenanya, fungsi keteladan petugas Polri menjadi sangat penting.

Sebagai syarat agar dapat membangkitkan dan mengembangkan kesadaran warga masyarakat untuk bermitra dengan Polisi, maka setiap

petugas harus senantiasa bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih menonjolkan pelayanan, menghargai kesetaraan antara Polisi dan warga serta senantiasa memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka mengamankan lingkungannya. Upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polisi harus menjadi prioritas dalam pendekatan tugas Kepolisian di lapangan karena timbulnya kepercayaan masyarakat (*trust*) terhadap Polri merupakan kunci pokok keberhasilan Polmas. Kepercayaan ini dibangun melalui komunikasi dua arah yang intensif antara polisi dan warga masyarakat dalam pola kemitraan yang setara.

Untuk menjamin terpeliharanya rasa aman, tertib dan tenteram dalam masyarakat, Polisi dan warga masyarakat mengggalang kemitraan untuk memelihara dan menumbuhkembangkan pengelolaan keamanan dan ketertiban lingkungan. Kemitraan ini didasari norma-norma sosial dan kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan hukum nasional yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan individu yang bertanggungjawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pengemban Polmas baik pada tataran Manajemen maupun petugas pelaksana di lapangan adalah keterampilan berkomunikasi yaitu kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi dan menerima umpan balik dan meringkas. Dibutuhkan juga keterampilan memecahkan masalah dan keterampilan memahami masalah, misalnya mengidentifikasi masalah di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah dan mengemban respon dan solusi yang efektif. Selain itu, keterampilan dan kepribadian untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi juga sangat dibutuhkan oleh para petugas *Community Policing*. Keterampilan kepemimpinan seperti keterampilan memperkirakan resiko dan tanggung jawab, keterampilan menentukan tujuan dan keterampilan manajemen. Keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok seperti, keterampilan dalam pertemuan, keterampilan identifikasi

kepemimpinan, keterampilan identifikasi sumber daya dan keterampilan membangun kepercayaan. Petugas Polmas juga harus mampu memahami dan menghormati hak asasi manusia, keterampilan mediasi dan negosiasi, memahami keanekaragaman, kemajemukan dan prinsip non-dikriminasi, serta mampu memahami hak-hak kelompok rentan dan cara menangani/memperlakukan mereka.

Petugas Polmas juga harus mempunyai karakteristik dan kepribadian dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengenali diri sendiri, percaya diri, disiplin pribadi, profesional, dan integritas. Mengenali diri sendiri dimaksudkan memahami kelebihan yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kelancaran tugas dan di sisi lain juga menyadari atas kekurangan/kelemahan diri sendiri guna dikikis/diperbaiki. Percaya diri yaitu bersikap optimis terhadap kemampuannya, apa yang dilaksanakannya dan bagaimana melaksanakannya serta tidak takut mengembangkan kemampuan diri. Ketaatan kepada peraturan dan ketertiban diri dalam penggunaan waktu secara efektif untuk melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Kemampuan profesional Polri sebagai pelindung, penganyom dan pelayan masyarakat khususnya kemampuan membangun kemitraan dengan warga masyarakat. Keteguhan dan ketangguhan jiwa raga secara menyeluruh mencakup aspek kepribadian, mentalitas, moralitas dan profesionalitas.

Disamping kepribadian, diperlukan pula penampilan yang baik dari petugas Polmas. Penampilan yang baik tersebut yaitu simpati, selalu berpakaian rapi, sikap menarik dan menunjukkan empati, ramah, selalu menunjukkan sikap berteman/bersahabat, murah senyum, mendahului sapa dan membalas salam, optimis yaitu bersikap positif tidak ragu akan keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan, inisiatif contohnya kemampuan mengajukan gagasan dan prakarsa dalam mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi dan memecahkan permasalahan dengan melibatkan masyarakat, tertib : selalu teratur dalam melaksanakan pekerjaan dan aktivitas agar dapat memanfaatkan waktu seproduktif mungkin, cermat misalnya teliti dalam mengumpulkan dan menganalisa fakta serta

mempertimbangkan konsekuensi atas setiap keputusan, akurat yaitu mampu menentukan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan disertai argumentasi yang, tegas yaitu mampu mengambil keputusan dan tindakan tegas tanpa keraguan serta melaksanakannya tanpa menunda-nunda waktu.

B. Strategi Komunikasi Program *Community Policing* (Pendekatan Manajemen Strategi)

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan diperlukan strategi yang tepat. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan program dalam kurun waktu tertentu. Dilaksanakan dengan mengkoordinasikan tim kerja, memilih tema faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip untuk melaksanakan gagasan strategis secara rasional dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Masri dinyatakan bahwa :

“Strategi kita dalam dalam menciptakan kemitraan dengan masyarakat yaitu dengan melakukan komunikasi persuasif. Kita gencar melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat. Sosialisasi-sosialisasi program telah kita rencanakan sejak awal sehingga kegiatan yang dilaksanakan terarah dan diharapkan bisa efektif. Pendekatan-pendekatan personil juga sudah kita lakukan, diusahakan tiap Kecamatan terdapat FKPM sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.”

Kegiatan untuk membina hubungan dengan komunitas dalam PR dikenal dengan *Community Relations*. *Community Relations* pada dasarnya merupakan kegiatan komunikasi perusahaan dalam menjalankan hubungan dengan komunitas lokal. Hubungan dengan komunitas merupakan usaha titip diri kepada lingkungan, kepada khalayak penduduk sekitar agar tidak mengganggu dapat mempertahankan citra perusahaan dimata publik (Rachmadi, F. 1994).

Sebagai suatu strategi *Community Policing* merupakan model perpolisian yang menekankan kemitraan sejajar antara Polisi dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi

kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Untuk teknik pendekatan Binamitra Polres Muna, dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, menggunakan Pola-pola komunikasi, yaitu :

- a. *Informatif* yaitu menjelaskan sesuatu secara cepat, tepat, dan benar
- b. *Persuasif*, artinya dilakukan dengan cara yang baik, memikat hati, bujukan, ajakan, rayuan, pujian, dan sebagainya.
- c. *Motivatif*, artinya memberi harapan-harapan kepada masyarakat dan mendorong untuk bisa berbuat sesuatu yang positif.
- d. *Edukatif*, artinya bersifat mendidik, meningkatkan wawasan untuk mengembangkan sifat positif serta meningkatkan kemampuan.
- e. *Komunikatif*, artinya sesuai dengan semboyan yang dikembangkan di lingkungan Polri yaitu menggunakan pola 3 S (Senyum, Sapa, dan Salam) yaitu komunikasi yang ramah, sopan, sesuai dengan norma yang berlaku di wilayah tugasnya masing-masing dengan lebih terbuka dan akrab (Dokumentasi Unit Humas Polres Muna).

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi dalam program *Community Policing* yang telah dilakukan oleh Binamitra Polres Muna telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh R. A Santoso Sastrosapoetro dalam bukunya *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, metode persuasif yaitu asosiasi, menumbuhkan kekhawatiran yang merangsang dengan kehendak sendiri melakukan sesuatu pemecahan, mengubah pendapat dengan harapan, menumbuhkan keinginan, kehendak untuk memilih atau melakukan sesuatu , dan menumbuhkan partisipasi dan peran serta.

Pola *Community Policing* lebih menekankan cara dalam meningkatkan kemitraan dengan komunitas melalui komunikasi persuasif yang dilakukan lewat kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

Penilaian konteks merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program. Kebutuhan yang belum terlayani, populasi, dan sampel dari individu yang dilayani dan tujuan program. Penilaian konteks terbagi

dalam lima komponen yaitu, latar belakang pelaksanaan program, tujuan program, sasaran program, perencanaan program dan kesesuaian antara program dengan tugas pokok *Community Policing* (Pemolisian Masyarakat/Polmas).

Metode program *Community Policing* (Polmas) adalah melalui penyelenggaraan kemitraan antara Polri dengan masyarakat yang didasari prinsip kesetaraan guna membangun kepercayaan warga masyarakat terhadap Polri, sehingga terwujud kebersamaan dalam rangka memahami masalah kamtibmas dan masalah sosial, menganalisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

Bentuk kegiatan komunikasi dalam penerapan Polmas yaitu kegiatan pelayanan dan perlindungan warga masyarakat contohnya intensifikasi kegiatan pembinaan masyarakat dan intensifikasi Patroli dan tatap muka petugas Polri dengan warga. Komunikasi Intensif petugas Polri warga masyarakat, seperti intensifikasi kontak person antara petugas dengan warga secara langsung atau tatap muka, atau melalui sarana komunikasi, pemanfaatan sarana media cetak (*press*) maupun elektronik, namun dalam kegiatan program *Community Policing* pada kabupaten Muna tidak menggunakan sarana media elektronik, dikarenakan kurangnya sarana tersebut di Kabupaten Muna.

Penyelenggaraan forum komunikasi Polri dan masyarakat berupa pemanfaatan FKPM untuk pemecahan masalah, eliminasi, akar permasalahan dan pengendalian masalah sosial seperti pemanfaatan tempat, balai pertemuan untuk forum komunikasi masyarakat dengan Polisi dan pemanfaatan Forum pertemuan yang dilaksanakan warga masyarakat secara rutin, periodik atau insidental.

Pendekatan dan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh formal dan informal (adat, agama, pemuda, tokoh, perempuan, pengusaha, profesi, dan

sebagainya) dalam rangka mengeliminasi akar permasalahan dan pemecahan masalah keamanan atau ketertiban. Pemberdayaan pranata sosial untuk pengendalian sosial, eliminasi akar masalah, dan pemecahan masalah sosial. Penerapan konsep *alternative dispute resolution* (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya mentralisir masalah selain melalui proses hukum), misalnya melalui upaya perdamaian. Pendidikan atau pelatihan keterampilan penanggulangan gangguan KAMTIBMAS dan koordinasi dan kerjasama dengan kelompok formal ataupun informal dalam rangka pemecahan masalah KAMTIBMAS.

Prinsip penyelenggaraan Polmas adalah Komunikasi intensif, yaitu praktek pemolisian yang menekankan kesepakatan dengan warga, bukan pemaksaan berarti bahwa Polri menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat melalui tatap muka, telekomunikasi, surat, pertemuan-pertemuan, forum-forum komunikasi, diskusi dan sebagainya di kalangan masyarakat dalam rangka membahas masalah keamanan.

Bentuk yang dilakukan Binamitra Polres Muna dalam mempersuasikan program *Community Policing* adalah melalui komunikasi langsung. Komunikasi Langsung adalah bentuk dari komunikasi dengan cara bertatap muka (*face to face*) antara komunikator dan komunikan. Dalam proses ini yang disebut komunikator adalah Binamitra Polres Muna dan yang menjadi komunikan adalah publik terutama masyarakat Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Bentuk kegiatan komunikasi langsung yang dilakukan Binamitra Polres Muna kegiatan Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Bintibmas), seperti sosialisasi Polmas dan FKPM dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh daerah, penyuluhan Pokdar (kelompok sadar) keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penyuluhan Kamtibcar (keamanan, ketertiban, dan kelancaran) Lalu lintas, penyuluhan hukum Polmas, pembinaan dan penyuluhan langsung terhadap tukang parkir dan ojek.

Manajemen strategi yang digunakan oleh Program *Community Policing* adalah sebagai berikut :

1. *Planning* (Perencanaan)

a. Latar Belakang

Penilaian terhadap latar belakang program *Community Policing* di peroleh melalui wawancara dengan pelaksanaan program dengan mengajukan pertanyaan :

Apa latar belakang dilaksanakannya Program Community Policing ?

Jawaban AKP Masri selaku kepala divisi Humas Polres Muna:

“Dalam rangka menciptakan situasi kondisi keamanan masyarakat dimana jumlah Polisi dengan jumlah masyarakat ibaratnya 1;1000, yang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu adanya keterlibatan dari masyarakat. Untuk menyikapi kebutuhan jumlah warga masyarakat dengan Polri yang tidak relevan tersebut maka Polisi melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menciptakan situasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan cara menggandeng masyarakat, menjalin suatu kemitraan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban yang menjadi dambaan masyarakat itu sendiri.”

Sedangkan data dari buku pedoman *Community Policing*, latar belakang atau dasar pertimbangan penerapan program *Community Policing*, yaitu pola penyelenggaraan pemolisian yang bertumpu kepada konsep peningkatan jumlah Polisi dan/atau peningkatan intensitas kepada Polisi (misalnya patroli dan penindakan pelanggaran) tidak mampu mengatasi atau menekan angka gangguan Kamtibmas yang berkembang pesat di dalam masyarakat.

Pemolisian lebih efektif dengan mengalihkan pendekatan konvensional ke pendekatan modern yaitu penerapan Polmas menekankan upaya pemecahan masalah yang terkait dengan kejahatan dan ketidaktertiban secara proaktif bersama-sama dengan masyarakat.

Praktek keterlibatan masyarakat tradisional dalam pemolisian sudah di kenal di Indonesia diantaranya dalam bentuk ronda kampung, *jogo boyo*, *jogo tirta*, *pecalang* dan sebagainya. Pola-pola penyelesaian masalah masyarakat melalui adat kebiasaan sudah umum diterapkan di dalam masyarakat tradisional, yang kesemuanya merupakan pola-pola pemecahan masalah dan pencegahan serta pembinaan ketentraman dan kerukunan masyarakat yang mendasarkan pada asas kemitraan, kebersamaan dan keharmonisan di dalam masyarakat..

Penerapan Polmas sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, hal. 12).

Kondisi sebagaimana diutarakan di atas mendorong diluncurkannya program program baru dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian terutama yang disebut *Community Policing*. Lambat laun, *Community Policing* tidak lagi hanya merupakan suatu program dan/atau strategi melainkan suatu falsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat madani. Model ini pada hakekatnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai objek tetapi mitra Kepolisian dan pemecahan masalah (pelanggaran hukum) lebih merupakan kepentingan dari pada sekedar proses penanganan yang formal/prosedural.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, latar belakang program *Community Policing* dilatari oleh kenyataan bahwa sumber daya manusia kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara solitai atau seorang diri. Polisi membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Syarat utama program ini adalah terjalinnya kedekatan hubungan antara Polisi dan masyarakat. Tepatnya, kemitraan yang harmonis dan upaya

menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban warga masyarakat.

Latar belakang permasalahan adalah yang paling utama dalam menjalankan program. Latar belakang merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan atau diselesaikan melalui perencanaan dan pelaksanaan program. Jadi, latar belakang digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam perencanaan suatu program. Dari data wawancara dan dokumen, membuktikan bahwa latar belakang dari program *Community Policing* yang kuat. Dengan latar belakang yang kuat, maka perencanaan akan lebih terarah.

b. Tujuan Program.

Penilaian terhadap tujuan program *Community Policing* diperoleh melalui hasil wawancara dengan pelaksanaan program dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah tujuan diadakannya program Community Policing ?

Jawaban dari AKP Masri selaku kepala divisi Humas Polres Muna:

“Adapun tujuan dari penerapan Polmas yaitu mewujudkan adanya kerjasama antara polisi dengan masyarakat yang sifatnya simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara pihak Polri dengan masyarakat dan mewujudkan adanya kemitraan antara Polri dan masyarakat, yang mana dulu Polri sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, sekarang kita sama-sama, polisi sebagai subjek, masyarakat juga sebagai subjek, sebagai *partnership*/mitra dalam rangka mengeliminir permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.”

Penilaian terhadap tujuan program *Community Policing* yaitu terwujudnya model pemolisian yang protagonis dengan kedekatan Polisi dan masyarakat sebagai pilar utamanya, terbinanya kerjasama dan tanggung jawab bersama antara Polri dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan keamanan dan

ketertiban masyarakat (kamtibmas), berkembangnya potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, dan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas melalui cara-cara yang positif, proaktif, konstruktif, dan kreatif serta menguntungkan semua pihak yang berkecimpung dalam pembinaan kamtibmas (<http://www.dharana-lastarya.org>, diakses 14 Agustus 2010).

Telah disebutkan dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa program ini memang bertujuan untuk mewujudkan kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesaadaraan bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, hal. 17).

Kemitraan polisi dan masyarakat, meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tentram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat

terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius. Yang dimaksud tindak pidana ringan yaitu ancaman hukum tindak pidana tersebut masa kurungannya tidak lebih dari 3 bulan.

c. Sasaran Program.

Sasaran program *Community Policing* adalah semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kebutuhan bagi setiap individu, kelompok bahkan negara untuk menjaga kelangsungan hidup dan terselenggaranya pemerintahan. Menyadari akan pentingnya rasa aman dan adanya berbagai keterbatasan sumber daya kepolisian maka peran serta masyarakat membantu tugas-tugas keamanan tidak dapat dielakkan.

Kegiatan program *Community Policing* yang dilaksanakan oleh Binamitra Polres Muna difokuskan kepada sasaran-sasaran potensial, yang memang mungkin mendapatkan sosialisasi *Community Policing*. Contoh sasaran kelompok potensial itu adalah Satpam, anggota poskamling, remaja SMA, kelompok sadar Kamtibmas, dan komunitas-komunitas tertentu seperti tukang ojek dan juru parkir.

Binmitra Polres Muna juga memperhatikan sasaran dari anak-anak. Binamitra melakukan kerjasama dengan Taman Kanak-Kanak yang ada di kabupaten Muna Sulawesi Tenggara untuk dilakukan sosialisasi pada usia dini. Anak-anak tersebut dikenalkan mengenai sosok Polisi. Hal ini ditujukan untuk menumbuh-kembangkan pengetahuan anak-anak mengenai kamtibmas. Meskipun sosialisasi yang diberikan masih dalam tahap pengenalan Polisi, diharapkan anak-anak dapat ikut serta dalam penciptaan Kamtibmas di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.

Tujuan strategi komunikasi program *Community Policing* (Polmas) adalah terwujudnya kemitraan Polri dengan warga masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan,

menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Persyaratan guna membangkitkan hubungan kemitraan dan kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam penerapan strategi Polmas yaitu terwujudnya sikap perilaku yang didasari oleh keyakinan, ketulusan, dan keikhlasan semua pimpinan pada setiap tingkatan organisasi Polri beserta seluruh anggota jajarannya untuk meningkatkan pelaksanaan *Community Policing*. Terwujudnya sikap perilaku segenap personal Polri baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat yang menyadari bahwa warga masyarakat/komunitas adalah pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepada siapa mereka dituntut menyajikan layanan kepolisian yang optimal. Sikap, perilaku dan kesadaran ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Komunikasi yang intensif antara warga masyarakat dengan Polri yang didasari prinsip kesetaraan saling menghargai, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Terwujudnya kesadaran masyarakat walaupun berbeda latar belakang dan kepentingan bahwa penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama.

Sasaran strategi program *Community Policing* meliputi :

1. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungannya.
2. Meningkatnya kemampuan masyarakat bersama dengan Polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisis dan memecahkan masalahnya.
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melanggar hukum.

4. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas di lingkungannya masing-masing.
6. Menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat/komunitas (Buku Pegangan *Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat*).

Dalam perencanaan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yaitu harus *Smart* yaitu *Specific* artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. Tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. *Measurable* artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. *Achievable* artinya dapat dicapai. Jadi bukan angan-angan. *Realistic* artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Tapi tetap ada tantangan. *Time* artinya ada batas waktu yang jelas. Mingguan, bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sehingga mudah dinilai dan dievaluasi (Hunger & Wheelan. 2003).

Awal perencanaan program *Community Policing* merupakan tahap persiapan yang harus dilakukan Binamitra Polres Muna. Langkah-langkah pembentukan FKPM adalah bersama-sama Camat dan aparat pemerintah desa atau komunitas kawasan melaksanakan sosialisasi Polmas kepada masyarakat, bersama-sama tokoh/aparat desa merencanakan pertemuan dalam Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), Kapolsek dan petugas Polmas memfasilitasi pembentukan FKPM dalam pertemuan umum sampai terbentuknya FKPM, dan kesesuaian Program dengan Tugas Pokok Binamitra Polres Muna.

Penugasan kepada para pelaksana operasional dan pengembangan strategi Polmas ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan/mempertimbangkan faktor-faktor seperti bentuk kegiatan atau model Polmas yang diterapkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan masyarakat di wilayah penugasan. Perbandingan antar

kualitas/kapasitas warga masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan Polmas dengan kualitas pengemban tugas Polmas juga menjadi faktor pertimbangan. Selain itu, pertimbangan antara bobot materi untuk kegiatan Polmas dibandingkan dengan kualitas, kapasitas dan kemampuan pelaksana pengemban Polmas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol Kep/54/X/2000, perumusan tugas pokok Binamitra, yang menjadi dasar acuan personil Binamitra Polres Muna untuk dilaksanakan tugasnya, yaitu bagian Binamitra (Pembina Kemitraan) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres, yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi/mengarahakan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkomponen, membina hubungan kerjasama dengan organisasi, lembaga, tokoh sosial, kemasyarakatan, dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri. (Surat Keputusan Kapolri No. 54, 2002, *Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres)* Hal. 6. Jakarta).

Penilaian terhadap perencanaan Program *Community Policing* diperoleh melalui hasil wawancara dengan pelaksana program dengan mengajukan sebagai berikut :

Seperti apakah awal perencanaan program Community Policing?

Jawaban dari AKP Masri :

“Sebelum binamitra terjun langsung ke masyarakat, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi pada seluruh personil agar tahu tugas mereka. Setelah itu dilaksanakan sosialisasi-sosialisasi pada masyarakat dan melakukan pendekatan-pendekatan pada tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun

perangkat desa. Kita juga harus menentukan wilayah manasaja yang akan dilakukan sasaran, kita lakukan koordinasi dengan Polsek setempat sehingga akan memudahkan kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat.”

Awal perencanaan program *Community Policing* merupakan tahap persiapan yang harus dilakukan Binamitra Polres Muna. Strategi eksternal yang harus dilakukan kepolisian, salah satunya adalah membentuk Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) sebagai wadah komunikasi dalam program ini. Langkah-langkah pembentukan FKPM adalah sebagai berikut bersama-sama Camat dan aparat pemerintah desa atau komunitas kawasan melaksanakan sosialisasi Polmas kepada masyarakat, bersama-sama tokoh/aparat desa merencanakan pertemuan dalam Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), kapolsek dan petugas Polmas memfasilitasi pembentukan FKPM dalam pertemuan umum sampai terbentuknya FKPM, dan kesesuaian Program dengan Tugas Poko Binamitra Polres Muna.

Tujuan dari program *Community Policing* sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Binamitra Polres Muna. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan AKP Masri:

“Yang menjadi tugas pokok dalam program *Community Policing* adalah pembinaan terhadap masyarakat, itu telah menjadi kewajiban Binamitra Polres Muna Sulawesi Tenggara.”

Agar kegiatan PR Binamitra Polres Muna melalui program *Community Policing* berjalan dengan efektif, diperlukan teknik komunikasi yang tepat. Teknik komunikasi seorang *Public Relations Officer* di instansi pemerintah, termasuk Binamitra Polres Muna tidak berbeda dengan teknik komunikasi yang digunakan *Public Relations* dibidang lainnya, yaitu teknik komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif dapat dilakukan oleh Binamitra Polres Muna dengan mengaplikasikan formula AIDDA, yaitu :

- A - *Attention* : menarik perhatian
- I - *Interest* : membangkitkan niat
- D - *Desire* : menumbuhkan hasrat

D - *Decision* : membuat keputusan

A - *Action* : melakukan penggiatan

(Effendy, 2000).

Dengan formula AIDDA, akan terjadi proses transfer *Public Relations* yang bisa mengubah opini negatif menjadi positif, dan dari prasangka menjadi menerima. Apalagi *Community Policing*, jika tidak melakukan teknik komunikasi persuasif yang benar justru dapat berpengaruh buruk terhadap citra dari instansi kepolisian sendiri.

Komunikasi merupakan komponen utama PR dalam menjalankan perannya di suatu instansi. Sebagai salah satu unsur fungsional manajemen dalam membangun citra yang baik bagi Polri, maka komunikasi dilakukan terus menerus agar terjaga sikap saling pengertian dari masyarakat sebagai sasaran *Community Policing* dan menghindarkan dari prasangka-prasangka yang bersifat negatif. Sesuai dengan definisi *Public Relations* yang merupakan fungsi manajemen yang membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerjasama suatu organisasi/perusahaan dengan publiknya dan ikut terlibat dalam menangani masalah-masalah atau isu-isu manajemen. PR membantu manajemen dalam penyampaian informasi dan tanggap terhadap opini publik. PR secara efektif membantu manajemen memantau berbagai perubahan. (Soemirat, Ardianto, 2002).

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Agar tujuan tercapai maka dibutuhkan pengorganisasian. Dalam sebuah institusi seperti Kepolisian RI biasanya diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi. Yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan. Pada setiap jabatan biasanya memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan uraian jabatan (*Job Description*). Semakin tinggi suatu jabatan biasanya semakin tinggi tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Biasanya juga semakin besar penghasilannya. Dengan pembagian tugas tersebut maka pekerjaan menjadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama

dijinjing. Disinilah salah satu prinsip dari manajemen. Yaitu membagi-bagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Pada dasarnya *Community Policing* dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari semua petugas di lapangan sampai puncak Pimpinan Polri. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri berbeda sifatnya sesuai dengan kedudukan dan batas kewenangan masing-masing.

Tingkat pengembangan strategi sampai pelaksana operasionalisasi *Community Policing*, meliputi pembina/Manajemen *Community Policing* terdiri dari pejabat Polri di Markas Besar (markas besar) Polri atau di kewilayahan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan dan operasionalisasi *Community Policing* di lingkungan wilayah penugasan, sesuai batas kewenangannya dan pengendali/Supervisor *Community Policing* terdiri dari pejabat Polri yang ditunjuk sebagai penengendali pelaksana kegiatan *Community Policing*.

Tabel 3. 1

Penjabaran Tugas Bagian Binamitra Polres Muna

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	AKP. Drs. La Raema	Kasat Binmas	Mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/ mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan membina hubungan kerjasama dengan organisasi/ lembaga/ tokoh sosial/ kemasyarakatan dan instansi pemerintah.
2.	Brigadir Nur Saleh	Kaur Mintu	Merencanakan penyusunan

			rencana kerja dibidang kegiatan bimbingan masyarakat serta pembinaan dalam rangka program Perpolisian Masyarakat
3.	Briptu Rezi Kapoor	Bintara Administrasi	Membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan dan bulanan untuk mengukur kinerja Binamitra Polres Muna
4.	Aiptu Andi Zulkarnain	Kanit Bin Polmas	Merencanakan penyusunan rencana kerja dibidang kegiatan kerjasama dengan organisasi/ lembaga/ tokoh masyarakat dan instansi pemerintah.
5.	Aipda Mappaseleng	Kanit Bin Tibmas	Membuat usulan/ merencanakan pengusulan anggota Babinkamtibmas, merencanakan kegiatan sambang dan penyuluhan tukang ojek, merencanakan/ menyusun penyuluhan terhadap Polhut, menyusun kegiatan

			sambang dan patroli pada obvit/provit yang menggunakan jasa anggota satpam dan menyusun kegiatan pembekalan Polmas dan HAM
6.	Aipda H. Rahman	Kanit Bin Kamsa	Membuat usulan/ merencanakan pengusulan anggota Babinkamtibmas, merencanakan kegiatan sambang dan penyuluhan ke pelosok-pelosok Desa
7.	Briptu Awal Bahida	Bintara Unit	Menyusun kegiatan sambang terhadap tukang parkir, memprogramkan kegiatan sambang dan pembinaan anggota poskamling
8.	Bripda Ilham	Bintara Unit	Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada PSA dalam rangka pengenalan figur Polri secara dini, melaksanakan kegiatan pembinaan dan latihan Pramuka Saka

			Bhayangkara
9.	Briptu La Pure	Bintara Unit	Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di Polsekpolsek secara kontinue, menyusun kegiatan penyuluhan hukum terhadap lapisan masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum dalam rangka menciptakan situasi kondusif.

Sumber : Unit Binamitra Polres Muna

Program *Community Policing* adalah tugas dan kewajiban seluruh anggota Kepolisian tanpa terkecuali Petugas Pelaksana *Community Policing* terdiri dari anggota/petugas secara perorangan atau dalam ikatan satuan (unit) yang melaksanakan kegiatan *Community Policing* yang langsung bersentuhan dengan sasaran Polmas.

Untuk wilayah Kabupaten Muna yang menjadi pusat pengaturan program ini adalah Polres Muna. Setiap bagian di Polres Muna mempunyai tugas masing-masing dalam program ini, begitu pula dengan bagian pembinaan dan penyuluhan masyarakat. Binamitra Polres Muna terdiri dari 9 staf yang menangani semua hal yang terkait perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan program *Community Policing* di wilayah Polres Muna.

Petugas Polmas terdiri dari Petugas BHABINKAMTIBMAS, petugas pos polisi dan anggota yang telah dididik atau dilatih khusus untuk Lakgas (melaksanakan tugas) Polmas yang bertugas mengunjungi warga masyarakat dari rumah ke rumah dengan memperhatikan etika dan

kesopanan, mengunjungi dan membina komunitas di masyarakat, membimbing warga masyarakat di FKPM (Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat), membantu warga masyarakat pecahkan masalah sosial, menolong warga masyarakat yang memerlukan bantuan Polisi, melayani masyarakat yang memerlukan Yan Pol (Pelayanan Polisi), mendata dan memantau warga masyarakat di wilayah tugasnya, menampung dan salurkan info dari masyarakat, serta menghadiri kegiatan masyarakat.

Penerapan Polmas pada kesatuan wilayah yaitu pembina (Manajer) Polmas Tingkat Kewilayahan (Kasatwilayah dan Wakapolres) bertugas untuk mengembangkan taktik, operasionalisasi dan strategi Polmas di wilayahnya, memberdayakan dukungan fungsi-fungsi untuk meningkatkan efektifitas Polmas di wilayahnya, menggalang koordinasi dan sinergi dengan instansi setempat untuk operasionalisasi dan pengembangan strategi Polmas serta mengevaluasi pelaksanaan program Polmas.

Pengendali atau Supervisor Polmas (Kasat Fungsi Binmas dan Kasat Fungsi Operasional Lainnya) bertugas untuk mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan pelaksanaan Polmas di lapangan agar lebih efektif dan selalu berada dalam koridor pedoman polmas. Pejabat fungsi teknis berkewajiban mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan fungsinya untuk mendukung kelancaran Polmas.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

Pemilihan personil Polri untuk ditugaskan sebagai petugas Polmas harus memperhitungkan latar belakang pengalaman tugas pada satuan-satuan fungsi operasional dan aspek moral/kepribadian yang mendukung pelaksanaan misalnya sebagai petugas Polmas. Sistem pembinaan personil harus menjamin terbukanya peluang peningkatan karier yang proaktif bagi petugas/pelaksana Polmas yang dinilai berhasil membina dan mengembangkan Polmas.

Pola operasionalisasi Polmas meliputi upaya pemecahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih mengutamakan proses mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan bersama dengan masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar mencakup penanganan masalah yang bersifat sesaat. Pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat menuju terwujudnya tujuh dimensi pelayanan masyarakat yang mencakup komunikasi berbasis kepedulian, tanggap, cepat dan tepat, kemudahan memberikan informasi, prosedur yang efisien dan efektif, biaya yang formal dan wajar, kemudahan penyelesaian urusan, lingkungan fisik tempat kerja yang kondusif; upaya penegak hukum lebih diutamakan kepada sasaran peningkatan kesadaran hukum daripada penindakan hukum dan upaya penindakan hukum merupakan alternatif tindakan yang paling akhir, bila cara-cara pemulihan masalah atau cara-cara pemecahan masalah yang bersifat persuasif tidak berhasil.

Bentuk-bentuk kegiatan dalam penerapan program *Community Policing* antara lain :

1. Kegiatan pelayanan dan perlindungan warga masyarakat yaitu dengan intensifikasi kegiatan pembinaan masyarakat dan intensifikasi patroli dan tatap muka petugas Polri dengan masyarakat.
2. Komunikasi intensif petugas Polri dan masyarakat yaitu dengan intensifikasi kontak person antara petugas dengan warga secara langsung/tatap muka (melalui saran komunikasi), pemanfaatan sarana

media pers cetak maupun elektronik, dan penyelenggaraan forum komunikasi Polri dan masyarakat.

3. Pemanfaatan FKPM (Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat) untuk pemecahan masalah, eliminasi akar permasalahan dan pengendalian masalah sosial. Pemanfaatan tempat, balai pertemuan untuk forum komunikasi masyarakat dan pemanfaatan forum pertemuan yang dilaksanakan warga masyarakat secara rutin, periodik dan insidentil.
4. Pendekatan dan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh formal dan informal (adat, agama, pemuda, tokoh, perempuan/ibu, pengusaha, profesi, dan sebagainya) dalam rangka mengeliminasi akar permasalahan dan pemecahan masalah keamanan/ketertiban.
5. Penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi, misalnya melalui upaya perdamaian.
6. Pendidikan atau pelatihan keterampilan penggulungan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Koordinasi dan kerjasama kelompok formal maupun informal dalam rangka pemecahan masalah Keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bentuk kegiatan Polmas yang dilaksanakan Supervisor/pengendali Polmas diselenggarakan dengan sistem tatap muka bersama komunitas tertentu menggunakan fasilitas yang ada seperti Balai Desa atau Kecamatan dan ruang rapat sekolah. Memberdayakan dan mengendalikan peran pranata sosial sebagai wadah untuk penyelesaian masalah sosial, agar dapat berfungsi positif bagi pemecahan masalah sosial dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Memfasilitas kegiatan umum (pertandingan olahraga, pementasan seni dan budaya, pertemuan ilmiah, pertemuan sosial) untuk sarana membangun kemitraan Polri dengan warga masyarakat. Koordinasi dengan penyelenggara pertandingan olahraga, pertunjukan seni dan budaya untuk menata pola

pengamanan guna mencegah terjadi gangguan ketertiban dan keamanan, misalnya pembatasan jumlah pengunjung agar tidak melebihi kapasitas lokasi, pembagian/penugasan koordinator penonton/supporter di lapangan dan sebagainya. Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menaggulangi gangguan Kamtibmas. Memfasilitasi penyelenggaraan lomba-lomba dan keterampilan yang berkaitan dengan masalah Kamtibmas (Dokumentasi Unit Humas Polres Muna).

Gambar 3. 1
Proses Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Binamitra Polres Muna



Sumber : Dokumentasi Unit Binamitra Polres Muna



Kemampuan yang harus dikembangkan setiap petugas *Community Policing* dalam rangkaian meningkatkan kemitraan dengan warga masyarakat meliputi indentifikasi, yaitu kemampuan mempelajari keadaan/kondisi dalam masyarakat yang mengandung potensi atau mengandung berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan permasalahan Keamanan dan ketertiban masyarakat ; penetapan prioritas, yaitu kemampuan menyeleksi dan menentukan permasalahan yang perlu didahulukan penanganannya, serta kemampuan berkonsentrasi terhadap rencana yang telah disusun agar tidak terganggu oleh usulan-usulan baru atau permasalahan yang kurang penting ; ketepatan waktu, yaitu kemampuan menyusun jadwal kegiatan dan menerapkannya secara efektif dan tepat waktu. Dalam hal ini, perubahan jadwal masih terbuka kemungkinannya berdasarkan negosiasi pihak yang terlibat.

Efektivitas dan efisiensi, yaitu kemampuan mengoptimalkan hasil pelaksanaan tugas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin. Dibutuhkan pertanggungjawaban, yaitu selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala akibat dari tindakan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas ataupun dalam kehidupan diri sendiri, serta tidak mengalihkan pertanggungjawaban kepada orang lain atas kesalahan yang dilakukannya.

Dalam kegiatannya petugas Polmas diharuskan mempunyai inovasi, yaitu kemampuan membangun imajinasi dan kreatifitas guna mengembangkan kiat/upaya, sehingga membuahkan hasil yang telah optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, konsistensi yaitu kemampuan menerapkan perlakuan/tindakan dengan standar yang sama guna menjamin kepastian hukum, mengurangi rasa khawatir serta memfasilitasi hubungan yang nyaman dengan masyarakat, tepat janji, yaitu selalu menepati/ memenuhi janji yang telah disampaikan kepada orang lain, guna menumbuhkan rasa percaya masyarakat, penuntasan pekerjaan secepatnya, yaitu selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan secepatnya tanpa menunda baik untuk kegiatan administrasi maupun

pelayanan masyarakat seperti pengarsipan, pelayan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat kehilangan, pengaduan laporan polisi, dan sebagainya serta pelayanan nirlaba, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memungut biaya lebih dari yang telah ditetapkan di dalam tarif resmi dan standar pelayanan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat.

Kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat meliputi kemampuan berbaaur dengan masyarakat, membangun hubungan yang harmonis melalui kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam masyarakat guna menumbuhkembangkan rasa saling percaya dan saling menghargai kredibilitas; luwes/supel/fleksibel : tidak bersikap kaku, melainkan selalu terbuka menerima pendapat dan akomodatif terhadap masukan pendapat serta mampu mempertimbangkan perubahan berdasarkan informasi baru guna menghindari timbulnya konflik yang tidak produktif; apresiasif : secara nyata selalu mengakui prestasi dan memberikan penghargaan kepada orang yang telah bekerja dengan baik.

Dapat berbuat adil, yaitu bersikap tidak memihak dan memperlakukan orang lain secara sopan, konsisten, tidak pilih kasih tanpa memandang perbedaan kelompok atau status warga misalnya ketokohan dan kewenangan. Diharuskan untuk berani mengatakan kebenaran yang dimaksudkan dengan keberanian berkata “tidak” terhadap suatu kegiatan/aktivitas, keputusan, atau permintaan yang pantas untuk ditolak/mendapatkan jawaban “tidak”. Kebenarian berkata “ya” untuk memberikan persetujuan terhadap suatu kegiatan/aktivitas, keputusan, atau permintaan yang pantas untuk diterima dan selanjutnya dilaksanakan dengan konsekuensi. Menghindari sikap/tindakan yang berpura-pura sehingga menimbulkan kesalahan persepsi atau kesan negatif dari masyarakat.

Seorang polmas dalam tugasnya juga dituntut untuk tidak mengenal istilah “kalah-menang” yaitu senantiasa mencari jalan pemecahan yang

saling menguntungkan (*win-win solution*) dengan tidak menonjolkan pernyataan ataupun persepsi pihak man yang kalah dan pihak mana yang menang guna meghindari dampak terjadinya dampak negatif dari masyarakat. Profesional, yaitu tindakan yang dilakukan selalu mendasari kepada kewajiban untuk melaksanakan tugas secara benar, sesuai prosedur serta teknik pelaksanaan tugas yang berlaku dalam profesi kepolisian. Tidak melibatkan masalah pribadi seperti menghindari gosip dan hal-hal pribadi lainnya serta tidak membangun hubungan pribadi yang berpotensi mengurangi efisiensi di lingkungan kerja dan kemitraan ; mengakui kesalahan, dalam hal ini secara ksatria terbuka mengakui atas kekeliruan tindakan atau kesalahan dan berusaha tidak berbohong atau menutup-nutupi kesalahan serta mengelak tanggungjawab atas kesalahan yang telah dilakukan dan menerima tugas-tugas sulit seperti tidak menghindari tugas-tugas yang sulit yang menjadi bagian dari kewajiban serta tanggungjawab dalam membangun kemitraan.

Kegiatan inti dari program *Community Policing* yang dilaksanakan Binamitra Polres Muna adalah program pembinaan dan penyuluhan melalui komunikasi persuasif. Artinya, yang dilakukan personil Binamitra Polres Muna dalam membujuk/membina masyarakat tanpa merasa dipaksa, sehingga menjalankannya dengan sukarela. Dilakukan dengan teknik-teknik membujuk atau persuasif karena, pada dasarnya persuasi menunjuk pada bentuk komunikasi yang menggerakkan serta melakukan sesuatu dengan rasa senang, rasa sukarela tanpa mempunyai perasaan dipaksa oleh orang lain. Cara yang digunakan yaitu dengan ajakan himbauan.

Dalam *Community Policing*, komunikasi yang dilakukan personil Binamitra Polres Muna bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat, agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam menjada keamanan dan ketertiban. Bilamana masyarakat menyadari bahwa mereka membutuhkan rasa aman, maka masyarakat diberikan motivasi dari Binamitra Polres Muna untuk mengerakkan masyarakat

dalam menumbuhkan keamanan secara swakarsa. Untuk menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dilakukan dengan membujuk dan membina masyarakat agar mau terlibat dalam menciptakan keamanan.

Kegiatan Pembinaan Redawa (Remaja, pemuda, dan wanita), seperti penyuluhan hukum, penyuluhan kenakalan remaja, penyuluhan narkoba dan dampak penyalahgunaannya, penyuluhan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), pembinaan Pramuka dan saka Bhayangkara, pelatihan PKS dan OSIS, dan pembinaan PSA (Polisi Sahabat Anak). Kegiatan Pembinaan Keamanan Swakarsa (Binkamsa) yaitu sambang dan kontrol poskamling, pembinaan anggota satuan pengamanan (Satpam), pembinaan dan penyuluhan anggota pos kamling, dan kegiatan kemitraan dengan Senkom (sentral komunikasi).

Tabel 3. 2

Data Kegiatan Binamitra Polres Muna Bulan Juli-September 2011

No	Sasaran Pembinaan	Tujuan Dari Pesan Yang Disampaikan	Frekuensi	Evaluasi
1.	Satpam	Agar para personil satpam memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya di wilayah kerjanya masing-masing. Serta memberi informasi yang baru yaitu cara mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban.	15 kali	Selama frekuensi pertemuan setiap Satpam dapat mengimplementasikan kegiatan dari pesan yang disampaikan. Meningkatnya kualitas pengamanan sebagai Satpam
2.	Anggota Poskamling	Agar para anggota poskamling memiliki kemampuan untuk menjaga lingkungan masing-masing demi menciptakan kondisi kamtibmas.	12 kali	Meningkatnya Kamtibmas di setiap lingkungan masyarakat.
4.	Pelajar SLTP	Agar para anggota PKS (Patroli Keamanan Sekolah) memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengaturan lalu-lintas di wilayah sekolahnya masing-masing. Sebagai upaya pencegahan	12 kali	Menurunnya jumlah kecelakaan dan pelanggaran Lalu-Lintas di wilayah Sekolah.

		kenakalan remaja dan juga para remaja tidak terlibat pada bahaya nakorba.		
5.	Anak-anak TK/Play Group	Agar siswa dapat mengenal keberadaan Polri secara lebih dekat serta mengerti rambu-rambu lalu-lintas yang ada di jalan raya.	9 kali	Dengan menggunakan alat peraga sebagai penyampaian informasi kepada anak-anak TK agar lebih dapat di pahami di kalangan anak-anak.
6.	Saka Bhayangkara	Mewujudkan remaja yang terampil melalui kegiatan yang lebih positif yaitu melalui kegiatan pramuka	12 kali	Dapat mengalihkan kegiatan remaja menjadi lebih positif. Berkurangnya remaja yang mengisi waktu dengan hanya berkumpul dan melakukan kegiatan yang tidak jelas.
7.	Tokoh Masyarakat	Agar masyarakat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kamtibmas sehingga keamanan swakarsa dapat berjalan dengan baik.	9 kali	Berkurangnya konflik-konflik antar warga dalam lingkungan.
8.	Pengurus FKPM	Agar para pengurus FKPM dapat memaksimalkan peranannya di wilayah masing-masing sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat tidak muncul kepermukaan dan dapat segera di atasi.	15 kali	Membantu Kepolisian dalam mengantisipasi adanya masalah. Menggunakan cara perdamaian jika konflik tidak dapat terhindarkan.
9.	Polisi Hutan/Polhut	Melakukan koordinasi dengan Polhut agar dapat bekerjasama dalam menjaga keamanan hutan.	6 kali	Berkurangnya pembalakan liar.

Sumber : Dokumentasi Unit Binamitra Polres Muna

Dari analisis kegiatan Polmas Binamitra Polres Muna, dinyatakan bahwa tugas-tugas dari Kepolisian untuk mengamankan lingkungannya diserahkan kepada masyarakat, salah satunya dilakukan oleh satpam. Dengan demikian pembinaan kepada satpam lebih diintensifkan agar

satpam yang mengamankan di wilayah lingkungan kerjanya memiliki bekal serta kemampuan yang cukup yang diperoleh pada saat pembinaan yang diberikan oleh personil Binamitra Polres Muna. Adanya kesediaan dari instansi untuk mengundang Binamitra Polres Muna serta memberikan bantuan dana yang diperlukan bagi terselenggaranya pendidikan satpam, merupakan salah satu bentuk bagian dari wujud partisipasi masyarakat dalam menciptakan kamtibmas. Artinya, Binamitra Polres Muna diperlukan untuk memberikan pembinaan keamanan kepada satpam.

Sedangkan bentuk kegiatan yang lainnya, yang tidak kalah penting adalah pembinaan anggota Poskamling. Poskamling merupakan wujud keamanan swakarsa yang dilakukan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing. Pembinaan anggota siskamling diharapkan dapat meningkatkan kamtibmas serta meminimalisir gangguan-gangguan yang muncul dalam masyarakat. Apabila para anggota siskamling memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai kamtibmas maka tugas personil Binamitra Polres Muna akan lebih ringan dan masyarakat pun memiliki lingkungan yang aman dan tertib.

Selain melakukan pencegahan terhadap kenakalan remaja, Binamitra Polres Muna juga mengajak para siswa untuk melakukan hak positif. Binamitra Polres Muna memberikan suatu bentuk pembinaan melalui PKS (Patroli Keamanan Sekolah). PKS membantu dalam hal kelancaran lalu lintas disaat para siswa pergi ke sekolah maupun disaat pulang sekolah. Karena pada jam-jam tersebut, sangat diperlukan pengaturan lalu-lintas disekitar sekolah masing-masing. Sehingga, Polisi akan lebih efektif dalam mengatur lalu-lintas yang lainnya. Bilamana hanya terfokus pada pengaturan lalu-lintas di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kabupaten Muna yang sangat banyak, maka dengan keterbatasan personil Polri tidak memungkinkan untuk mengatur lalu lintas di wilayah Kabupaten Muna khususnya pada pagi hari.

Pembinaan yang lain adalah pembinaan kepada anak-anak TK (Taman Kanak-Kanak) atau Play Group melalui Polisi Sahabat Anak (PSA). Anak-anak TK mulai diperkenalkan dengan sosok Polisi serta tugasnya-tugasnya. Cara penyampaian pesan oleh PSA (Polisi Sahabat Anak). Anak-anak TK mulai diperkenalkan dengan sosok Polisi serta tugas-tugasnya. Cara penyampaian pesan oleh PSA yang sekiranya dapat dimengerti oleh anak-anak TK. Oleh sebab itu membutuhkan adanya bentuk kreatifitas dari personil Binamitra Polres Muna agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak tersebut.

Informasi fokus kegiatan diperoleh melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan :

“Apakah yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program Community Policing ?”

Jawaban AKP Masri :

“Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan membentuk hubungan kesejajaran antara polisi dan masyarakat. Hal ini dalam kaitannya mengeliminir masalah-masalah ringan yang ada dimasyarakat dengan mencari solusi bersama. Kalau memperbaiki citra Polri itu hanya efek samping dari program ini, bukan fokus/tujuan utama program ini. Tapi tidak dipungkiri, program ini memang mengarah pada perbaikan citra Polri. Menjalin kemitraan dengan masyarakat kaitannya dalam menciptakan kondisi situasi dan Kamtibmas dan *problem solving* agar permasalahan-permasalahan di masyarakat tidak muncul ke permukaan.”

Kesuksesan sebuah program tidak terlepas dari kinerja tim pelaksana yang solid. Data tentang kelancaran pelaksanaan program diperoleh melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan :

“Bagaimana dengan tingkat kelancaran pelaksanaan kegiatan Community Policing ?”

Jawaban dari AKP Masri :

“Sudah cukup lancar sesuai dengan rencana yang dilakukan oleh anggota kami dan disamping itu masyarakat juga mendukung program ini”.

Klasifikasi strategi program *Community Policing* menggunakan bentuk-bentuk komunikasi adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi Interpersonal

Pada hakekatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar komunikator dengan komunikan, komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang, karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan (Effendy, 2003:30). Dalam program *Community Policing* komunikasi interpersonal dilakukan dengan komunikasi intensif petugas Polri dengan masyarakat secara langsung (tatap muka) misalnya penyuluhan Kantibmas.

2. Komunikasi Kelompok

Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, dan pemecahan masalah. Sebagai contoh dalam penerapan program *Community Policing* adalah adanya Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) untuk pemecahan masalah, eliminasi akar permasalahan dan pengendalian masalah sosial serta komunikasi intensif melalui pendekatan dengan tokoh-tokoh formal dan informal (adat, agama, pemuda, tokoh, perempuan/ibu, pengusaha, profesi, dan sebagainya).

3. Komunikasi Organisasi

Menurut Wiryanto (2005), komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Sebagai contohnya adalah memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Komunikasi informal

adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Sebagai contoh dalam penerapan program *Community Policing* yaitu penyampaian tugas maupun pesan dari atasan kepada bawahan (*up to down*) tentang kebijakan dan kegiatan-kegiatan atau program *Community Policing*. Sebaliknya, pelaporan dari kegiatan, program dan kebijakan yang telah dilakukan dari bawahan kepada atasan (*down to up*).

4. Komunikasi Massa

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikan berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan umumnya surat kabar, radio, dan televisi. Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa ialah bahwa media massa menimbulkan keserempakan (*simultaneity*), artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlahnya relatif banyak, dari mulai ratusan sampai ratus jutaan pada saat yang sama secara bersama-sama. Dengan demikian, media massa sangat efektif untuk menyebarkan informasi walau untuk merubah sikap, pendapat, dan perilaku komunikan belum tentu dapat efektif.

Media nirmassa umumnya digunakan dalam komunikasi untuk orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Biasanya media yang digunakan adalah surat, telepon, papan pengumuman, poster, spanduk, pamflet, brosur, dan lain-lain. Walau media nirmassa tidak mempunyai keserempakan dan komunikasi tidak bersifat massal, tetapi untuk kepentingan tertentu media nirmassa tetap efektif untuk digunakan, misal surat atau telepon sangat efektif untuk meyakinkan seseorang yang bertempat tinggal jauh (Mulyana, 2005). Dalam penerapan program *Community Policing* Polres Muna, komunikasi media massa tidak digunakan karena masih minimnya sarana media elektronik yang mengakibatkan kurang efektifnya kelangsungan kegiatan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka komunikasi yang dirasakan

lebih efektif adalah dengan komunikasi media massa karena pesan yang ingin disampaikan langsung tepat sasaran. Di dalamnya juga terjadi komunikasi timbal balik antara kedua belah pihak.

Dalam kegiatan yang dilakukan oleh binamitra Polres Muna lebih banyak dan lebih di fokuskan kepada komunikasi kelompok. Dimana seluruh kegiatan seperti penyuluhan mengandalkan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok digunakan seperti adanya dua orang atau lebih dalam suatu kondisi untuk saling bertukar pikiran dan memberikan respon. Anggota Polres Muna dalam kegiatannya memberikan informasi kepada masyarakat yang diharapkan adanya pengertian dan timbal balik.

4. Controlling (Evaluasi)

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan atau evaluasi, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman.

Pelaksanaan Polmas harus terus di analisis dan evaluasi serta dikembangkan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dinamis dalam masyarakat yang terus selalu berkembang.

Program *Community Policing* memiliki pandangan positif tentang program ini. Memang bila ditinjau dari hasil kualitatif, bisa disebut program ini berhasil. Namun kedepannya, jika ada program baru lagi yang akan dilaksanakan, seyogyanya juga mempertimbangkan dari sisi sasaran program, semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Sehingga program dapat berhasil baik secara kuantitas maupun kualitas, yaitu terbinanya hubungan kemitraan antara masyarakat dengan Polri.

Pada dasarnya pelaksanaan program *Community Policing* untuk menumbuhkan hubungan kemitraan dengan masyarakat, sehingga dapat membangun dan membina rasa saling percaya. Sejalan dengan dibentuk dan dipeliharanya hubungan kemitraan Polisi dengan masyarakat, kedua belah pihak akan memiliki kemampuan yang semakin baik saat bekerjasama dalam mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah yang mempengaruhi mutu kehidupan di lingkungan mereka. Pihak kepolisian akan membangun tanggung jawab atau komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan tersebut.

Ukuran keberhasilan Polri tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya untuk menekan angka kriminalitas dan menaikkan angka penyelesaian kasus kejahatan, tetapi juga oleh kemampuan Polri dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan Kamtibmas. Bentuk partisipasi ini lebih difokuskan pada kesadaran masyarakat dalam mengamankan dan menertibkan baiknya pribadi masing-masing maupun lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan dimana ia tinggal maupun lingkungan kerjanya. Dari pernyataan tersebut, ternyata partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Community Policing bukan hanya semacam program dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian tetapi merupakan suatu strategi mendasar yang menuntut perubahan yang mendasar dari penyelenggaraan tugas Kepolisian yang semula mendasari pada prinsip pelayanan birokratif ke arah personalisasi penyajian layanan Kepolisian, yaitu layanan nyata dilaksanakan oleh petugas Polri yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat.

Dalam rangka penerapan strategi Polmas dibutuhkan perubahan manajemen Polri guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan Polmas secara keseluruhan dari pusat sampai kewilayahan. Perubahan organisasi diarahkan kepada perubahan dalam rangka mewujudkan organisasi yang

memiliki daya saing dan berkembang. Perubahan individu diarahkan kepada penciptaan kesempatan-kesempatan untuk melakukan perubahan, baik dalam rangka pengembangan karier ataupun kehidupan pribadi.

Untuk meningkatkan kualitas *Community Policing* perlu dilakukan analisa dan evaluasi secara periodik dan berlanjut terhadap pelaksanaan *Community Policing*, sehingga dapat dijadikan bahan penilaian kemajuan *Community Policing*. Sarana untuk analisa dan evaluasi *Community Policing* dapat dilakukan melalui sistem pendataan yang memungkinkan proses analisis dari satuan terbawah sampai pusat, penentuan keberhasilan *Community Policing* yang dapat diformulasikan ke dalam data kuantitatif dan kualitatif, dan penyelenggaraan penelitian dan pembangunan untuk meningkatkan efektifitas Polmas dan untuk menyesuaikan perkembangan tantangan yang dihadapi.

Kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Polmas yaitu intensitas komunikasi antara petugas dengan masyarakat meningkat; keakraban hubungan petugas dengan masyarakat meningkat; kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat; intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat meningkat; kepekaan/kepedulian masyarakat terhadap masalah Keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya meningkat; daya kritis masyarakat terhadap akuntabilitas penyelesaian masalah Keamanan dan ketertiban masyarakat meningkat; ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yang berlaku meningkat; keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh Polisi dan masyarakat dan gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menurun.

Indikator Kinerja Penerapan Polmas dari aspek petugas yaitu kesadaran bahwa masyarakat adalah *stakeholder* yang harus dilayani, kesadaran atas pertanggungjawaban tugas kepada masyarakat, semangat melayani dan melindungi sebagai kewajiban profesi, kesiapan dan kesediaan menerima keluhan/pengaduan masyarakat, kecepatan merespon pengaduan/keluhan/laporan masyarakat, kecepatan mendatangi TKP,

kesiapan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat,, kemampuan menyelesaikan masalah, konflik/pertikaian antar warga, kemampuan mengakomodir/menanggapi keluhan masyarakat, dan intensitas kunjungan terhadap warga.

Indikator keberhasilan penerapan Polmas dari aspek masyarakat yaitu kemudahan petugas/pejabat dihubungi oleh warga masyarakat, loket pengaduan/laporan mudah ditemukan, mekanisme pengaduan mudah, cepat, dan tidak menakutkan, respon/jawaban atas pengaduan cepat/segera diperoleh, tingkat kepercayaan terhadap Polri, kemampuan forum menemukan dan mengidentifikasi akar masalah, kemandirian masyarakat mengatasi permasalahan di lingkungannya, berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada petugas, dan dukungan masyarakat dalam bentuk informasi, pemikiran atau materi.

Indikator keberhasilan Polmas dari aspek hubungan Polri dan masyarakat yaitu intensitas komunikasi petugas dan warga masyarakat, intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat, intensitas kegiatan di Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat, keakraban hubungan petugas dengan masyarakat, intensitas kegiatan kerjasama masyarakat dan petugas, kebersamaan dalam penyelesaian permasalahan, keterbukaan dalam saling tukar informasi dan membahas permasalahan, intensitas kerjasama dan dukungan Pemda, DPR, dan instansi terkait, dan intensitas partisipasi lembaga-lembaga sosial, media massa, dan lembaga informal lainnya.

Untuk Binamitra Polres Muna, konsistensi perencanaan tergantung dari dana yang diberikan pusat, seperti yang diungkapkan oleh Drs. AKP. La Raema selaku Kepala Satuan Binamitra :

“Konsistensi perencanaan semua tergantung anggaran yang telah ada”

Data mengenai frekuensi pelaksanaan program *Community Policing* diperoleh melalui wawancara dengan pertanyaan :

Bagaimana frekuensi pelaksanaan program Community Policing?

Jawaban Drs. AKP. La Raema :

“Pada tahun 2011 ini semua rencana kegiatan bisa tercapai dan sudah terjadwal dengan baik”

Dilihat dari segi kontinuitas dan konsistensinya, pelaksanaan program *Community Policing* sudah cukup efektif, karena dilaksanakan atau dijadwalkan secara berkesinambungan, meskipun pelaksanaan kadang tidak sesuai dengan perencanaan karena kendala dana. Tetapi untuk tahun 2011, semua perencanaan yang dibuat dapat direalisasikan semua.

Pada dasarnya yang menjadi ukuran keberhasilan Polri tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya untuk menekan angka kriminalitas dan menaikkan angka penyelesaian kasus kejahatan, tetapi juga oleh kemampuan Polri dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan Kamtibmas. Bentuk partisipasi ini lebih difokuskan pada kesadaran masyarakat dalam mengamankan dan menertibkan baiknya pribadi masing-masing maupun lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan dimana ia tinggal maupun lingkungan kerjanya. Dari pernyataan tersebut, ternyata partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mendapatkan data tentang parameter keberhasilan program *Community Policing* diperoleh melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan :

Apa yang menjadi parameter keberhasilan program Community Policing?

Jawaban dari AKP Masri :

“Kepercayaan masyarakat meningkat, masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas, tingkat pelanggaran hukum menurun, ada hubungan harmonis antara masyarakat dan polisi, kegiatan FKPM meningkat. Mungkin yang paling penting masyarakat lebih terbuka pada polisi dan percaya terhadap kinerja polisi.”

Jawaban Drs. AKP. La Raema :

“Salah satu indikator/tolak ukur keberhasilan program ini, adanya suatu pertemuan secara rutin baik itu sebulan sekali maupun setengah bulan

sekali yang mana FKPM yang ada di wilayah, kawasan maupun komunitas ada pertemuan secara rutin. Agendanya adalah membahas/mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat. Yang kedua adalah kaitannya masalah kunjungan, sejauh mana rencana kegiatannya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu apa merupakan suatu penilaian dari keberhasilan program. Sehingga FKPM bisa dikatakan berhasil apabila organisasi atau lembaga tersebut mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya. Indikator keberhasilan lainnya, gangguan Kamtibmas tingkat polsek atau polres bisa dieliminir, permasalahan-permasalahan yang ringan bisa diselesaikan di tingkat kawasan, wilayah maupun komunitas, sehingga tidak menjadi beban institusi polisi.”

Berdasarkan data hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa parameter keberhasilan program *Community Policing* yaitu terbentuknya kemitraan antara Polisi dan masyarakat sehingga masalah di masyarakat dapat teratasi.

C. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah instrument perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan eksternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang biasa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka (Hunger & Wheelan. 2003).

Sumber data dalam analisis SWOT pada penelitian ini berdasarkan pada data primer dan sekunder yaitu peneliti menyimpulkan melalui wawancara maupun berdasarkan pada pengamatan langsung.

Polres Muna Sulawesi Tenggara dalam membangun perpolisian masyarakat berbasis hubungan antar masyarakat mengacu kepada kondisi organisasi yang diuraikan dalam analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, & Threath*) berikut ini:

1. **Strength** (Kekuatan), adalah kemampuan internal yang positif dan situasi yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuan.

Analisis kekuatan untuk peran proaktif Kepolisian dalam membangun *community policing* pada Polres Muna sebagai berikut :

- a. Polres Muna Sulawesi Tenggara memiliki personel sebanyak 525 orang jika di banding jumlah penduduk Kabupaten Muna tahun 2011 sekitar 304.753 jiwa maka rasio Polri yaitu 1 : 398 orang yang jika dibandingkan dengan standar rasio yaitu 1: 400, maka Polres Muna telah memenuhi standar ratio Kepolisian Republik Indonesia (<http://www.komisikepolisianindonesia.com>, 12 Agustus 2011).
- b. Organisasi Polri merupakan organisasi pemerintah yang mempunyai fungsi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat di samping sebagai penegak hukum yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Organisasi Polri diatur sedemikian rupa sehingga Polres berfungsi sebagai Komando Operasi Dasar (KOD) sedangkan Polsek sebagai ujung tombaknya yang didukung oleh para Bhayangkara Pembina kamtibmas yang ada pada setiap kelurahan sebagai pelaksana lapangan sehingga secara teori setiap informasi dan kegiatan masyarakat pada lingkup paling kecil dapat terlayani.
- d. Polsek sebagai ujung tombak Polri memiliki Bhayangkara Pembina Kamtibmas yang berpengalaman, mengetahui karakter warga yang dibinanya, mengenal tokoh masyarakatnya, mendapat dukungan masyarakatnya baik melalui tokoh/pemuka agama, adat, pemuda, dikarenakan oleh tingginya volume kunjungan (sambang) ke wilayah binaannya.

2. **Weakness** (Kelemahan), adalah ketidakmampuan internal dalam organisasi yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai tujuan.

Analisis kelemahan untuk peran proaktif Kepolisian dalam membangun *community policing* pada Polres Muna Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana seperti keadaan lingkungan atau daerah yang terletak dipelosok, sulit untuk di tempuh mengakibatkan tidak semua wilayah dapat tersentuh dalam durasi waktu yang wajar.
 - b. Keterbatasan alat khusus (Alut)/ alat khusus (Alsus) maupun alat komunikasi (Alkom).
 - c. Kualitas sumber daya manusia (individu) yang kurang memadai. Mengingat dibawah standar pendidikan anggota Polres Muna yang berjumlah 525 personil yaitu pendidikan SMA/ sederajat berjumlah 490, S I berjumlah 35, dan S 2 dan S 3 bisa dikatakan nihil (Data Unit Polres Muna Sulawesi Tenggara).
 - d. Kesejahteraan anggota Polri yang masih belum memadai sehingga dalam melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas sering menggunakan uang pribadinya (wawancara langsung dengan beberapa anggota Bhabinkamtibmas).
 - e. Masih belum mampu dari segi anggaran untuk menerapkan teknologi informasi *on line* dari Polsek langsung ke Polres bahkan sampai ke Polda dan sebaliknya.
3. **Opportunity** (Peluang atau Kesempatan), adalah faktor-faktor eksternal dan situasi di luar organisasi yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Analisis peluang/kesempatan untuk peran proaktif Kepolisian dalam membangun *Community policing* pada Polres Muna adalah sebagai berikut :
- a. Adanya kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Kamtibmas Polres Muna dan Pemuka Agama Mitra Kamtibmas Polres Muna yang sangat peduli terhadap tugas-tugas Kepolisian yang dengan sukarela mengorbankan waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit demi terciptanya Kamtibmas wilayah yang kondusif.
 - b. Adanya Komunitas Peduli Kamtibmas tersebut akan dapat menurunkan ratio Polisi secara maya (*cyber police ratio*), karena

anggotanya (pengikut) dapat diberdayakan sebagai kepanjangan tangan, mata dan telinga Polri di tengah masyarakat secara lebih obyektif.

- c. Komunitas Peduli Kamtibmas yang berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang pendidikan dapat dijadikan sebagai mitra strategik dalam menambah wawasan individu anggota Polri.
- e. Adanya giat penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh instansi terkait serta sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Kelancaran dan kesuksesan suatu program tidak terlepas dari dukungan faktor eksternal. Pihak-pihak yang mendukung program ini adalah asosiasi pengusaha/pedagang, lembaga-lembaga non pemerintah yaitu perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit dan lain-lain, serta masyarakat umum.

Seperti yang diungkapkan oleh Drs. AKP La Raema :

“Banyak sekali pihak-pihak yang mendukung program ini, contohnya saja tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi di Muna, sekolah-sekolah dan Pemerintah Daerah”.

Demikian pula yang diutarakan AKP Masri :

“Semua pihak mendukung terutama Pemda, kalau sudah ada dukungan dari Pemda maka program ini akan lebih baik”.

Selain adanya dukungan dari pihak-pihak terkait, program *Community Policing* dapat berjalan lancar karena adanya dukungan dari masyarakat. Masyarakat butuh program *Community Policing* karena mereka dapat masyarakat dari program ini dengan harapan permasalahan yang ada dimasyarakat dapat terselesaikan dengan baik melalui kemitraan Polisi dan masyarakat, dan masyarakat sangat mengharapkan upaya pemeliharaan Kamtibmas dari pihak Kepolisian.

Pengukuran terhadap pencapaian tujuan merupakan perbandingan dari hasil yang direncanakan dan yang telah dicapai. Pengukuran terhadap pencapaian tujuan program digunakan sebagai kajian atas tujuan khusus program dan membandingkan antara hasil nyata dan hasil yang

direncanakan. Sumber data utama dalam penulisan ini adalah hasil dari wawancara dengan pelaksana program atas pertanyaan :

Bagaimana tingkat keberhasilan dari program Community Policing?

Jawaban dari Drs. AKP. La Raema :

“Sejauh ini tanggapan dari masyarakat sangat mengharapkan sekali program *Community Policing* ini tetap dilanjutkan. Karena manfaat dari program ini sangat positif sekali. Atensi dari masyarakat sangat tinggi sekali, bagus dan maju sekali, sehingga permasalahan-permasalahan bisa diantisipasi di tingkat bawah. Ini menunjukkan bahwa program *Community Policing* berhasil.”

Jawaban AKP Masri :

“Hasil dari program ini sangat positif sekali. Permasalahan-permasalahan dimasyarakat bisa dieliminir, dan masyarakat secara swakarsa dapat melakukan pengamanan di lingkungan masing-masing.”

Data mengenai pencapaian juga diperoleh dari wawancara dengan mengajukan pertanyaan tentang pendapat peserta program *Community Policing* :

Bagaimana pendapat anda tentang program Community Policing ?

Jawaban dari Waode Apriyanti Saera :

“Program ini bagus karena dengan begini masyarakat akan lebih mengenal polisi secara dekat. Pendapat-pendapat miring mengenai polisi juga bisa diluruskan. Masyarakat kan sudah ada perasaan antisipasi dulu dengan Polisi, kalau ada pendekatan seperti ini kan mereka bisa mengubah penilaiannya.”

Jawaban dari Abdul Muin :

“Ya kalau menurut saya Polmas sangat bermanfaat. Desa kami ini lebih aman dan warga bisa diajak menjaga keamanan bersama.”

Jawaban dari Bucek :

“Cukup efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kalau untuk satpam seperti saya dalam mengamankan lingkungan, kan ada pembinaan dan penyuluhan dari Polres.”

Jawaban dari Ali Sahabat :

“Program ini sangat membantu guru untuk memperkenalkan hukum terhadap para pelajar selain itu agar masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan keamanan, jadi tidak ada perbedaan lagi antara Polisi dan masyarakat, semua mempunyai tugas untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan yang kondusif”.

Jawaban dari Adelia Sari :

“Saya sangat mendukung program ini karena kami sebagai pelajar diajarkan banyak hal tentang pentingnya menjaga keamanan dan mengenal hukum. Para petugas juga membawakan penyuluhan dengan cara yang baik sehingga kami para pelajar dapat memahaminya”.

Dari hasil wawancara diatas, semua peserta program memiliki pandangan positif tentang program *Community Policing*. Memang bila ditinjau dari hasil kualitatif, bisa disebut program ini berhasil.

4. **Threat** (Ancaman atau Hambatan), adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai tujuannya.

Analisis ancaman/hambatan untuk peran proaktif Kepolisian dalam membangun *community policing* pada Polres Muna adalah sbb :

- a. Kondisi krisis multi dimensi pada saat ini menjadikan semakin maraknya kejahatan tingkat jalanan (*marginal crime*) karena alasan kebutuhan perut yang semakin mencemaskan masyarakat khususnya masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah.
- b. Munculnya kejahatan dengan dimensi baru (*new dimention crime*) yang karena memanfaatkan kemajuan teknologi mengakibatkan sulit tersentuh oleh aparat Kepolisian yang juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
- c. Wilayah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang masih banyak terdapat potensi kehutanan dan perikanan yang masih menjadi primadona pendapatan masyarakat sehingga pembalakan liar (*illegal logging*) maupun (*Illegal mining*) masih menjadi mata pencarian utama masyarakat Kabupaten Muna, sampai saat ini belum ada solusi dari Pemda dalam pengalihan pekerjaan.

- e. Belum memadainya pendidikan personel Polri. Contohnya, rata-rata dari personel tersebut hanya sebatas tamatan SMA/ sederajat.
- f. Kebiasaan masyarakat Kobar mengkomsumsi Miras dan membawa Sajam, ini merupakan kebiasaan tradisional yang masih belum dapat dihilangkan seratus persen, sehingga memungkinkan timbulnya dampak negatif dalam bentuk kasus Penganiayaan / Pembunuhan yang berbuntut kasus Sara.
- g. Masih sulitnya pengawasan senjata api gelap, yang sering digunakan masyarakat setempat terutama yang berada di pedalaman (senjata buatan sendiri / senpi gelap) dengan alasan untuk menjaga kebun dari gangguan babi hutan, rusa dan kera.

Dalam setiap pelaksanaan suatu program tentu ada kendala ataupun hambatan yang menjadi kendala dalam program *Community Policing* didapat dari hasil wawancara dengan pelaksana program, secara keseluruhan untuk pelaksanaan program memang ada kendala yang dihadapi, seperti yang diungkapkan oleh AKP Masri :

“Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, hanya saja kita masih kekurangan dana. Saat ini masih diupayakan melobi Pemda agar mau memasukkan anggaran program ini dalam APBD”

Kendala yang dihadapi dalam program ini juga mengenai masalah dana. Dana yang berasal dari pusat masih kurang memadai untuk semua kegiatan yang dilaksanakan Binamitra Polres Muna. Hal ini menyebabkan adanya kegiatan yang harus dikurangi dan menyebabkan kegiatan kurang optimal. Binamitra Polres Muna sedang mengupayakan pendekatan kepada Pemda agar bersedia memasukkan anggaran program *Community Policing* dalam APBD. Karena memang sudah seharusnya Polres bekerjasama dengan Pemda mengenai anggaran program ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data, observasi dan hasil wawancara yang berhasil dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan dasar analisis secara keseluruhan maka diketahui mengenai bagaimana implementasi dari program *Community Policing*. Ditinjau dari pelaksanaan program, maka implementasi program *Community Policing* bisa dikategorikan berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, karena mampu meningkatkan kemitraan antara Polisi dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian. Namun bila pengertian keefektifan pelaksanaan program *Community Policing* dari sisi sasaran program maka pelaksanaan program *Community Policing* belum dapat dikategorikan efektif karena belum semua masyarakat dilibatkan dalam program ini dikarenakan tidak semua wilayah atau daerah dapat terlayani.
2. Bentuk komunikasi yang digunakan program *Community Policing* sudah tepat, yaitu komunikasi persuasif dan komunikasi langsung (tatap muka) melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Penyampaian pesan-pesan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dengan pemahaman materi yang didasarkan pada pengalaman personil Binamitra Polres Muna. Selain itu komunikasi kelompok juga menjadi acuan dari program ini karena banyak melibatkan kelompok seperti FKPM, dan penyuluhan yang dilakukan dengan beberapa orang atau sekelompok masyarakat.
3. Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan program *Community Policing* dalam Binamitra Polres Muna antara lain adanya dukungan dari masyarakat Kabupaten Muna karena mereka merasa program

Community Policing bermanfaat dalam mewujudkan Kamtibmas di lingkungan mereka. Apresiasi yang tinggi dari masyarakat sangat mendukung kelancaran program ini. Adanya dukungan dan kerjasama baik dari pihak eksternal. Pihak-pihak tersebut antara lain Pemda Kabupaten Muna, asosiasi pengusaha, lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah.

4. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan program *Community Policing* Binamitra Polres Muna antara lain belum memadainya dana yang diberikan oleh kantor pusat, sedangkan Pemda belum memasukkan anggaran program dalam APBD. Binamitra Polres Muna sedang melakukan pendekatan kepada Pemda agar segera memasukkan anggaran dana program ini ke APBD. Pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) baru disebagian wilayah Kabupaten Muna, belum merata disemua daerah, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tentang program ini.

B. KENDALA

Kendala yang di alami dalam pengimplentasian program *Community Policing* ini adalah :

1. Sarana jalan raya di Kabupaten Muna yang sangat rusak dan tidaknya adanya fasilitas lampu jalan membuat sulitnya menjangkau daerah-daerah pelosok yang menjadi sasaran program.
2. Dana dari Pemerintah daerah yang belum cair, membuat program ini terkadang menuda untuk megimplemntasikan programnya secara keseluruhan atau merata.
3. Masih kurang memadainya media elektronik seperti radio dan televisi lokal sehingga program hanya mengandalkan komunikasi kelompok atau penyuluhan langsung (tatap muka) dengan masyarakat.

C. SARAN

Dari kesimpulan diatas maka peneliti memiliki beberapa saran yang bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan program-program *Public Relations* atau strategi hubungan masyarakat masa mendatang dan sebagai saran untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa. Saran tersebut yaitu :

1. Kepada Bagian Divisi Hubungan Masyarakat Polres Muna, agar lebih memantangkan perencanaan dari strategi yang diambil, serta melakukan monitoring dan evaluasi terutama dampak terhadap citra instansi Kepolisian di Kabupaten Muna serta untuk setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dijadikan tolak ukur pada kegiatan selanjutnya. Meningkatkan kualitas kerja para personil Binamitra Muna dalam berkomunikasi dengan masyarakat sehingga setiap program yang dilaksanakan akan lebih efektif. Tanggap terhadap kritik dan saran serta opini publik yang terbentuk dimasyarakat. Tanggapan positif dengan meningkatkan pelayanan Polisi terhadap masyarakat akan menimbulkan rasa kepuasan masyarakat atas kinerja Polisi. Selain itu demi kelancaran dan keefektifisan pelaksanaan program sebaiknya menggunakan media massa elektronik seperti radio dan majalah atau koran.
2. Kepada Peneliti Lain
Penelitian ini belum mampu menggali lebih dalam tentang ukuran efektifitas suatu program *Public Relations* sehingga disarankan agar peneliti selanjutnya agar mengkaji ulang penelitian ini dengan teknik penelitian yang berbeda, mengingat penelitian ini masih jauh sempurna.
3. Kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kerjasamanya dengan pihak Kepolisian karena keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak Kepolisian saja dan tidak berpikiran negatif terhadap kinerja Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinar Nur Huda, Wiryono, Erwin Lebe, dan Irmulan Satit. 2004. *Perhumasan Dalam Warna*. Bandung. BPP Perhumas Bidang Komunikasi.
- Anggoro, M. Linggar. 2001. *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Bayley, William G. 2005. *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*. Diterjemahkan oleh angkatan III dan IV KIK-UI bekerjasama dengan Rahayu Hidayat. Jakarta. YPKIK.
- Bayley, David H. 1998. *Police For Future*. Diterjemahkan oleh Kunarto dan Nur Khobibah M. Arief Dimyanti. Jakarta. Cipta Manunggal.
- Buku Pegangan *Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM)*. 2005. Kerjasama Mabes Polri dengan Organisasi Migrasi Untuk Internasional (OIM) dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Dermawan, Moh. Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwilaksa, Chryshnando. 2003. *Pemolisian Komunitas (Community Policing) dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban, dalam Bunga Rampai Kepolsian Indonesia*. Parsudi Suparlan. 2004 (ed). Jakarta. YPKIK.
- Ernest & Nancy Borman. 1991. *Retorika : Suatu Pendekatan Terpadu*. Jakarta. Erlangga.
- Friedmann, Robert R. 1992. *Community Policing Comparative, Perspective and Prospect*, diterjemahkan oleh Kunarto dan Adrian Syamsuddin. Jakarta. Citra Manunggal.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta. UII Press.

- J. David Hunger & Thomas L. Wheelan. 2003. *Management Strategis*, diterjemahkan oleh Julian Agung. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Jalaluddin, Handi. 2001. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*. Jakarta. PTIK "Press".
- Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cetakan ke-20. Jakarta. Djabatan.
- Kunarto. 1997. *Tribarta, Catur Prasetya, Sejarah Perspektif dan Porspeknya*. Jakarta. Cipta Manunggal.
- Kratcoski, Peter C, dan Duane Dukes. 1999. *Issues in Community Policing*. Cincinnati OH : Anderson Publishing Co.
- Khasali, Rhenald. 1999. *Manajemen Public Relations : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta. PT. Pustaka Utama.
- Khasali, Rhenald. 2003. *Manajemen Public Relations : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta. PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*. Jakarta. Teruna Grafica.
- Lihawa, Ronny. 2005. *Understanding Community Policing-Memahami Community Policing*. Jakarta. YPKIK.
- Moleong, L.J. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- , 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Moore, Frazier. 2005. *Humas Membangun Citra dengan Komunikasi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy M.A, Ph.d. 2005. *Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Onong Uchjana Effendy. 2000. *Dinamika Komunikasi*, CV. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta. LKSI Pelangi Aksara.

- Putra, I Gusti Ngurah. 1999. *Manajemen Hubungan Masyarakat*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya.
- R.A Santoso Sastropoetro. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung . PT. Remaja Rosdakarya.
- Rachmadi, F. 1994. *Public Relations : Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Raharjo, Sapjito. 2007. *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya. Laksbang Mediatama.
- Rakhmat, Jalaludin. 1995. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ruslan, Rosady. 1995. *Praktik dan Solusi Public Relations dalam Situasi Krisis dan Pemulihan Citra*. Jakarta. Galia Indonesia.
- . 2006. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rumanti, Sr, Maris Assumpta. 2002. *Dasar-dasar Public Relations dan Praktek*. Jakarta. Grasindo.
- Reksodiputro, Mardjono. 2006. *Polmas Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Implementasi Penegakkan Hukum*. Makalah Untuk Diskusi Pasis Sespim Dik Reg.42 T.P.2006.
- Ritzer, George, Douglas J.Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Ed. Ke-6. Diterjemahkan Oleh Alimandan. Jakarta. Kencana.
- Sastropoetra, R.A.S. 1988. *Partisipasi Komunikasi Persuasif dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Suparlan, Parsudi. 1994. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Program kajian wilayah Amerika.
- . 2005. *Suku Bangsa dan Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta. YPKIK.
- . 2007. *Memantapkan Kepemimpinan Polri Guna Akselerasi Strategi Polmas dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri*. Makalah

untuk Seminar Nasional Sespati Polri Dik.Reg.Ke-13 dan Pasis Sespim Polri Dik.Reg.Ke-45 T.P 2007.

- Susanto. 2006. *Polmas, Paradigma Baru Polri*. Jakarta. YPKIK.
- Susanto, Sastropetro R. A. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. Alumni.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, dasar Teori dan Terpaannya dalam Penelitian*. Surakarta. Sebelas Maret Press.
- Soeratmi, Soleh, M.S., Ardianto. E. M.Si. 2004. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Scott M. Cutlip, Allen h. Center, Glen M. Broom ; Penerjemah : Tri Wibowo. 2006. *Efektif Public Relations*. Jakarta. Kencana.
- Tabah, Anton. 1998. *Reformasi Kepolisian*. Klaten. CV. Sahabat.
- Wasesa, Silih Agung. 2006. *Strategi Public Relations*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wirawan. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta. Gramedia Widiasarana.



Website

http://harianbatampos.com/web/index/.php?option=com_content&task=view&id=73265&Itemid=374. Diakses pada 15 Agustus 2011.

<http://www.dharana-lasytarya.org/index.php?query=setiap+polisi+adalah+pelaksana+polmas&pilih=search>. Diakses pada 15 Agustus 2011.

<http://wanvisioner.blogspot.com/2009/05/poac-planning-organizing-actuating-and.html>. Diakses pada 12 Agustus 2011.

<http://www.komisikepolisianindonesia.com>. Diakses pada 12 Agustus 2011.

<http://www.indosiar.com>. Diakses pada 12 Agustus 2011.

<http://www.isiindonesia.com>. Diakses pada 12 Agustus 2011.

<http://bhayangkaraindonesia.blogspot.com>. Diakses pada 12 Agustus 2011.

